

# Indikator Penting

## Provinsi Papua

*Edisi Desember 2023*




**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI PAPUA**

# Indikator Penting

## Provinsi Papua

*Edisi Desember 2023*





©Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

INDIKATOR PENTING PROVINSI PAPUA  
EDISI DESEMBER 2023

ISSN : 2477-4772  
Katalog BPS : 1103009.94  
No. Publikasi : 94000.2216

Naskah: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Editor : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Tata Letak : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Kover : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Dicetak Oleh : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Jayapura : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2023  
xv + 79 halaman; 18,2 cm x 25,7 cm (B5 JIS)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

# INDIKATOR PENTING PROVINSI PAPUA

*Edisi Desember 2023*

Pengarah :

Adriana Helena Carolina, SE., MM

Editor :

Priyo Yudyatmoko, S.ST, M.P.P.

Penulis :

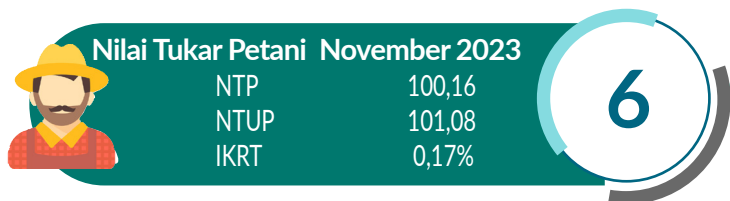
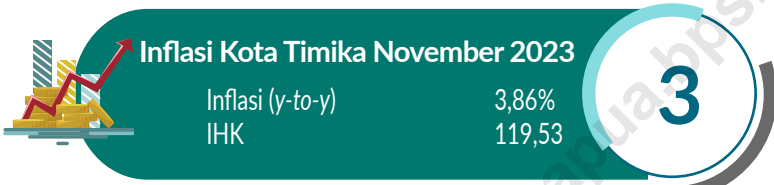
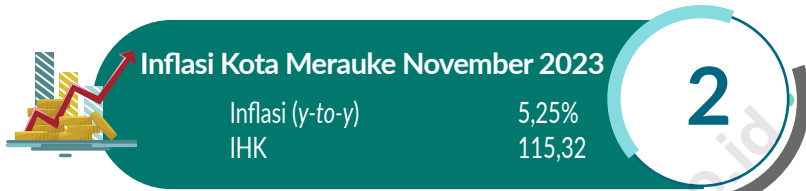
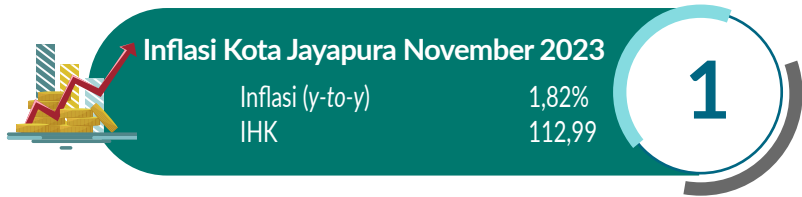
Deny Riani Maghfiroh, S.ST

Pengolah Data :

Deny Riani Maghfiroh, S.ST

Penyiapan Draft :

Deny Riani Maghfiroh, S.ST



Head

Outline

7

### Hasil Pencacahan Lengkap ST2023 Tahap 1 Provinsi Papua

RTUP 71.214 rumah tangga	UPB	27 unit
UTP 73.676 unit	UTL	33 unit



8

### Hasil Pencacahan Lengkap ST2023 Tahap 1 Provinsi Papua Selatan

RTUP 65.843 rumah tangga	UPB	17 unit
UTP 67.637 unit	UTL	2 unit



9

### Hasil Pencacahan Lengkap ST2023 Tahap 1 Provinsi Papua Tengah

RTUP 204.439 rumah tangga	UPB	6 unit
UTP 205.438 unit	UTL	5 unit



9

### Hasil Pencacahan Lengkap ST2023 Tahap 1 Provinsi Papua Pegunungan

RTUP 221.168 rumah tangga	UPB	0 unit
UTP 221.189 unit	UTL	2 unit



10

### Angkutan Laut Oktober 2023

Penumpang (org)	Barang (ton)
Berangkat 12.170	Muat 19.263
Datang 11.432	Bongkar 111.456



11

### Angkutan Udara Oktober 2023

Penumpang (org)	Barang (ton)
Berangkat 99.108	Muat 15.992
Datang 109.262	Bongkar 1.349









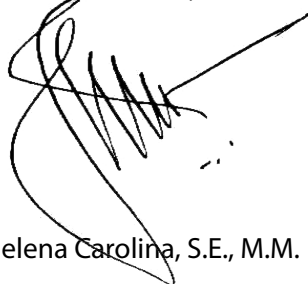
# Kata Pengantar

Indikator Penting Provinsi Papua ini diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua. Data dan informasi yang dimuat merupakan perkembangan data terbaru yang dihimpun dan dirilis BPS, yang merupakan hasil pendataan langsung dan hasil kompilasi produk administrasi pemerintah yang dilakukan secara teratur (bulanan, triwulanan dan tahunan) oleh jajaran BPS di seluruh Provinsi Papua.

Publikasi ini dimaksudkan untuk melengkapi bahan penyusunan kebijakan dan evaluasi kemajuan yang dicapai baik di bidang sosial maupun bidang ekonomi. Indikator Penting Provinsi Papua ini mencakup antara lain: Penduduk, perkembangan bulanan Inflasi, Transportasi, Nilai Tukar Petani (NTP), Ekspor-Impor, Pertumbuhan Ekonomi, Ketenagakerjaan, Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan, IKK, IPM, serta Produksi Tanaman Pangan.

Data yang lebih luas dan spesifik untuk sektor tertentu, tersedia dalam publikasi BPS lainnya atau dapat diperoleh melalui website <http://papua.bps.go.id>. Semoga buku ini bermanfaat bagi seluruh penggunanya.

Jayapura, Desember 2023  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI PAPUA,



Adriana Helena Carolina, S.E., M.M.







# Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR</b>	vii
<b>DAFTAR ISI</b>	ix
<b>DAFTAR TABEL</b>	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	xi
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	xiii
<b>PERTANIAN</b>	
Tanaman Pangan	3
Hasil ST 2023 Tahap 1 Provinsi Papua ( <i>update</i> )	5
Hasil ST 2023 Tahap 1 Provinsi Papua Selatan ( <i>update</i> )	6
Hasil ST 2023 Tahap 1 Provinsi Papua Tengah ( <i>update</i> )	7
Hasil ST 2023 Tahap 1 Provinsi Papua Pegunungan ( <i>update</i> )	8
<b>SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN</b>	
Penduduk	13
Kemiskinan	16
Ketimpangan	20
Indeks Demokrasi Indonesia	21
Ketenagakerjaan	22
Indeks Pembangunan Manusia	25
Indeks Kebahagiaan	28
Potensi Desa (PODES)	30
Indeks Ketimpangan Gender	32
<b>EKONOMI DAN PERDAGANGAN</b>	
Inflasi Kota Jayapura ( <i>update</i> )	37
Inflasi Kota Merauke ( <i>update</i> )	40
Inflasi Kota Timika ( <i>update</i> )	43
Produk Domestik Regional Bruto	46
Ekspor ( <i>update</i> )	49
Impor ( <i>update</i> )	53
Nilai Tukar Petani ( <i>update</i> )	55
Angkutan Laut ( <i>update</i> )	58
Angkutan Udara ( <i>update</i> )	60
Industri Manufaktur	61
Pola Distribusi Perdagangan	66
Pariwisata ( <i>update</i> )	67
<b>LAMPIRAN</b>	73

# Daftar Tabel

Tabel 1.	Jumlah RTUP, UPB, dan UTL Menurut Kabupaten/Kota, 2013 dan 2023	5
Tabel 2.	Jumlah RTUP, UPB, dan UTL Menurut Kabupaten/Kota, 2013 dan 2023	6
Tabel 3.	Jumlah RTUP, UPB, dan UTL Menurut Kabupaten/Kota, 2013 dan 2023	7
Tabel 4.	Jumlah RTUP, UPB, dan UTL Menurut Kabupaten/Kota, 2013 dan 2023	8
Tabel 5.	Garis Kemiskinan Menurut Daerah Provinsi Papua Maret 2015-Maret 2023 (rupiah)	18
Tabel 6.	Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, TPT dan TPAK di Provinsi Papua	23
Tabel 7.	Indeks Kebahagiaan dan Indeks Dimensi Menurut Karakteristik, 2021	29
Tabel 8.	Tingkat inflasi Month to Month, Year To Date, Year On Year tahun 2021 - 2023	37
Tabel 9.	IHK, Andil Inflasi, dan Inflasi Year on Year Kota Jayapura Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)	38
Tabel 10.	Tingkat inflasi Month to Month, Year To Date, Year On Year tahun 2021 - 2023	40
Tabel 11.	IHK, Andil Inflasi, dan Inflasi Year on Year Kota Merauke Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)	41
Tabel 12.	Tingkat inflasi Month to Month, Year To Date, Year On Year tahun 2021 - 2023	43
Tabel 13.	IHK, Andil Inflasi, dan Inflasi Year on Year Kota Timika Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)	44
Tabel 14.	Laju Pertumbuhan PDRB dengan Pertambangan dan Penggalan ADHB Menurut Beberapa Kategori Lapangan Usaha (persen)	47
Tabel 15.	Laju Pertumbuhan PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (persen)	48
Tabel 16.	Ringkasan Perkembangan Ekspor Provinsi Papua September 2023	49
Tabel 17.	Ringkasan Perkembangan Impor Provinsi Papua September 2023	52
Tabel 18.	Neraca Perdagangan Provinsi Papua (Juta US\$)	53
Tabel 19.	Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian Menurut Subsektor Provinsi Papua dan Persentase Perubahannya, Agustus-September 2023 (2018=100)	57



Tabel 20.	Perkembangan Penumpang Berangkat dan Datang Angkutan Laut Dalam Negeri Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke, September 2023	59
Tabel 21.	Perkembangan Bongkar dan Muat Barang Angkutan Laut Dalam Negeri Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke, September 2023	60
Tabel 22.	Perkembangan Penumpang Berangkat dan Datang Angkutan Udara Dalam Negeri Bandara Sentani, Mopah, dan Mozes Kilangin, September 2023	61
Tabel 23.	Perkembangan Bongkar dan Muat Barang Angkutan Udara Dalam Negeri Bandara Sentani, Mopah, dan Mozes Kilangin, September 2023	62
Tabel 24.	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Menurut KBLI Provinsi Papua Triwulan IV-2019 (persen)	65
Tabel 25.	Pola Utama Distribusi Perdagangan di Papua Tahun 2022	66
Tabel 26.	TPK dan RLTM Hotel Bintang di Papua, September 2023	67
Tabel 27.	TPK dan RLTM Hotel Non Bintang di Papua, September 2023	68

# Daftar Gambar

Gambar 1.	Produksi Beras Provinsi Papua Tahun 2021-2023* (Ton)	3
Gambar 2.	Penduduk Miskin Provinsi Papua Maret 2015-September 2023	11
Gambar 3.	Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan Provinsi Papua Maret 2015-Maret 2023 (rupiah)	12
Gambar 4.	Indeks Demokrasi Provinsi Papua, 2010-2020	15
Gambar 5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Klasifikasi Wilayah Agustus 2021-Agustus 2023 (%)	17
Gambar 6.	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Nasional dan Papua Tahun 2020-2023	20
Gambar 7.	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Indonesia, 2023	20
Gambar 8.	Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan UPT/SPT Hasil PODES Provinsi Papua Tahun 2011, 2014 dan 2018	22
Gambar 9.	Perkembangan Sarana Sektor Ekonomi Provinsi Papua, 2014 dan 2018	24
Gambar 10.	Perkembangan Sarana Sektor Pendidikan Provinsi Papua, 2014 dan 2018	25
Gambar 11.	Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Papua, 2018-2022	26
Gambar 12.	Pertumbuhan Ekonomi y-on-y Provinsi Papua, Triwulan II-2020-Triwulan III-2023 (persen)	35
Gambar 13.	Nilai Ekspor Provinsi Papua Menurut Negara Tujuan, Agustus 2023* (Juta US\$)	44
Gambar 14.	Nilai Impor Provinsi Papua Menurut Negara Tujuan, September 2023* (Juta US\$)	47
Gambar 15.	Perkembangan NTP Papua Menurut Subsektor September-Oktober 2023 (2018=100)	49
Gambar 16.	Perkembangan Indeks Konsumsi Rumah Tangga Menurut Subkelompok Pengeluaran Provinsi Papua September-Oktober 2023 (2018=100)	50
Gambar 17.	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Menurut KBLI Provinsi Papua Triwulan IV-2019 (persen)	58

# RINGKASAN EKSEKUTIF

*Edisi Desember 2023*

## 1. Inflasi Kota Jayapura

- Pada bulan November 2023, tercatat Kota Jayapura mengalami inflasi tahun ke tahun (November 2023 terhadap November 2022) sebesar 1,82 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,99.
- Inflasi tahun kalender (Januari-November 2023) Kota Jayapura sebesar 0,87 persen.
- Inflasi bulan ke bulan (November 2023 terhadap Oktober 2023) sebesar 0,10 persen.

## 2. Inflasi Kota Merauke

- Pada bulan November 2023, tercatat Kota Merauke mengalami inflasi tahun ke tahun (November 2023 terhadap November 2022) sebesar 5,25 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,32.
- Inflasi tahun kalender (Januari-November 2023) Kota Merauke sebesar 3,86 persen.
- Inflasi bulan ke bulan (November 2023 terhadap Oktober 2023) sebesar 0,30 persen.

## 3. Inflasi Kota Timika

- Pada bulan November 2023, tercatat Kota Timika mengalami inflasi tahun ke tahun (November 2023 terhadap November 2022) sebesar 3,86 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 119,53.
- Inflasi tahun kalender (Januari-November 2023) Kota Timika sebesar 3,14 persen.
- Inflasi bulan ke bulan (November 2023 terhadap Oktober 2023) sebesar 0,84 persen.

## 2. Nilai Tukar Petani

- Nilai Tukar Petani (NTP) Papua pada November 2023 sebesar 100,16 persen atau mengalami penurunan 0,02 persen dibandingkan Oktober 2023.
- Komponen pembentuk NTP yaitu Indeks Harga Diterima Petani (It) sebesar 111,60 dan Indeks Harga Dibayar Petani (Ib) sebesar 111,42.
- Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian Papua sebesar 101,08 atau mengalami peningkatan sebesar 0,05 persen dibandingkan Oktober 2023.

## 3. Transportasi

### a. Transportasi Laut

- Jumlah penumpang yang berangkat pada Oktober 2023 dengan moda angkutan laut sebanyak 12.170 orang.
- Jumlah penumpang yang datang pada Oktober 2023 dengan moda transportasi angkutan laut sebanyak 11.432 orang.
- Volume barang yang dimuat pada Oktober 2023 sebanyak 19.263 ton.
- Volume barang yang dibongkar pada Oktober 2023 sebanyak 111.456 ton.

#### **b. Transportasi Udara**

- Jumlah penumpang yang berangkat pada Oktober 2023 dengan moda angkutan udara dalam negeri di tiga bandara sebanyak 99.108 orang.
- Jumlah penumpang yang datang pada Oktober 2023 dengan moda transportasi angkutan udara dalam negeri di tiga bandara sebanyak 109.262 orang.
- Volume barang yang dimuat pada Oktober 2023 sebanyak 15.992 ton.
- Volume barang yang dibongkar pada Oktober 2023 sebanyak 1.349 ton.

#### **4. Ekspor dan Impor**

- Ekspor Papua pada November 2023 tercatat senilai US\$538,07 juta. Ekspor bulan ini hanya berupa ekspor nonmigas senilai US\$538,07 juta.
- Dilihat menurut ekspor golongan HS 2 digit, maka ekspor golongan Biji-bijian, logam, terak, dan abu (HS26) senilai US\$538,01 juta, golongan Ikan & Hewan Air Lainnya (HS03) senilai US\$0,06 juta, dan Non Migas Lainnya senilai US\$0,002 juta yang dikirimkan langsung dari Papua. Tidak terdapat ekspor Kayu & Barang dari Kayu (HS44) pada bulan ini.
- Total ekspor yang ditujukan ke enam negara tujuan utama (Spanyol, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, India dan Filipina) nilai ekspornya mencapai US\$409,08 juta dan ekspor yang dilakukan ke negara lain sebesar US\$128,99 juta.
- Impor Papua pada November 2023 sebesar US\$25,06 juta berupa impor migas senilai US\$8,97 juta dan impor nonmigas sebesar US\$16,09 juta.
- Impor 10 golongan nonmigas utama pada November 2023 tercatat senilai US\$12,12 juta.
- Nilai impor dari 7 negara utama pada November 2023 sebesar US\$12,58 juta.
- Neraca Perdagangan Papua pada November 2023 mengalami surplus sebesar US\$513,01 juta. Kondisi surplus mengindikasikan bahwa nilai ekspor lebih besar dibandingkan nilai impornya.

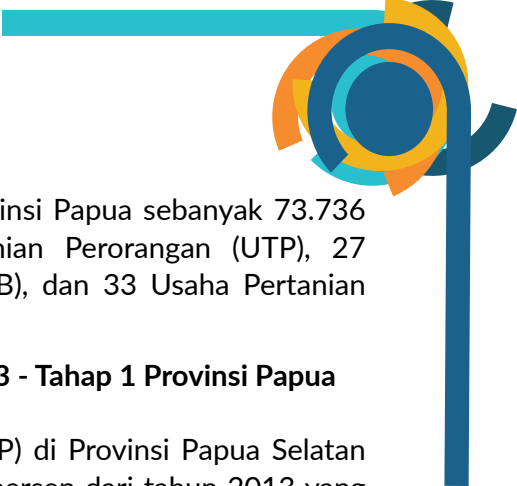
#### **5. Pariwisata**

- TPK Hotel Bintang selama Oktober 2023 mencapai 35,68 persen.
- Rata-rata lama menginap tamu (RLMT) di hotel bintang pada Oktober 2023 mencapai 1,68 hari.
- TPK Hotel nonbintang selama Oktober 2023 mencapai 19,57 persen.
- Rata-rata lama menginap tamu (RLMT) hotel nonbintang pada Oktober 2023 sebesar 1,36 hari.

#### **6. Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap 1 Provinsi Papua**

- Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) di Provinsi Papua sebanyak 71.214 rumah tangga, naik 20,07 persen dari tahun 2013 yang sebanyak 59.310 rumah tangga.



- 
- Jumlah usaha pertanian hasil ST2023 di Provinsi Papua sebanyak 73.736 unit yang terdiri atas 73.676 Usaha Pertanian Perorangan (UTP), 27 Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB), dan 33 Usaha Pertanian Lainnya (UTL).

#### **7. Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap 1 Provinsi Papua Selatan**

- Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) di Provinsi Papua Selatan sebanyak 65.843 rumah tangga, naik 27,50 persen dari tahun 2013 yang sebanyak 51.640 rumah tangga.
- Jumlah usaha pertanian hasil ST2023 di Provinsi Papua Selatan sebanyak 67.656 unit yang terdiri atas 67.637 Usaha Pertanian Perorangan (UTP), 17 Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB), dan 2 Usaha Pertanian Lainnya (UTL).

#### **8. Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap 1 Provinsi Papua Tengah**

- Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) di Provinsi Papua Tengah sebanyak 204.439 rumah tangga, naik 49,74 persen dari tahun 2013 yang sebanyak 136.529 rumah tangga.
- Jumlah usaha pertanian hasil ST2023 di Provinsi Papua Tengah sebanyak 205.449 unit yang terdiri atas 205.438 Usaha Pertanian Perorangan (UTP), 6 Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB), dan 5 Usaha Pertanian Lainnya (UTL).

#### **9. Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap 1 Provinsi Papua Pegunungan**

- Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) di Provinsi Papua Pegunungan sebanyak 221.168 rumah tangga, naik 15,69 persen dari tahun 2013 yang sebanyak 191.179 rumah tangga.
- Jumlah usaha pertanian hasil ST2023 di Provinsi Papua Pegunungan sebanyak 221.191 unit yang terdiri atas 221.189 Usaha Pertanian Perorangan (UTP), dan 2 Usaha Pertanian Lainnya (UTL).



# PERTANIAN



# MENGENAL SENSUS PERTANIAN 2023

Tahun 2023, Sensus Pertanian Indonesia akan menjadi Sensus Pertanian Ke-7

# 7

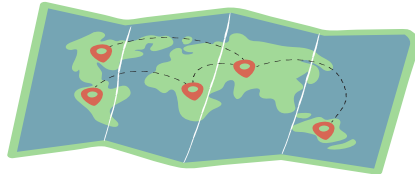


## CAKUPAN ST 2023

- Tanaman Pangan
- Hortikultura
- Perkebunan
- Perikanan
- Peternakan
- Kehutanan
- Jasa Pertanian

## CAKUPAN WILAYAH

34 Provinsi  
514 Kabupaten/kota



## CAKUPAN UNIT USAHA PERTANIAN

- Usaha Pertanian Perorangan
- Usaha Pertanian Berbadan Hukum
- Usaha Pertanian Lainnya

Sensus Pertanian dilakukan pada tahun berakhiran 3 sejak tahun 1963, 1973, 1983, 1993, 2003, 2013 dan 2023. Kegiatan ini dilakukan diseluruh Indonesia dengan wilayah sensus terkecil adalah Satuan Lingkungan Setempat (SLS). Selain itu tahun 2023, data yang digunakan berasal informasi awal dari hasil Sensus Penduduk 2020, data Kementan, KKP, KLHK, dan Sumber lainnya

**ST 2023**  
SENSUS PERTANIAN

# 1 Tanaman Pangan

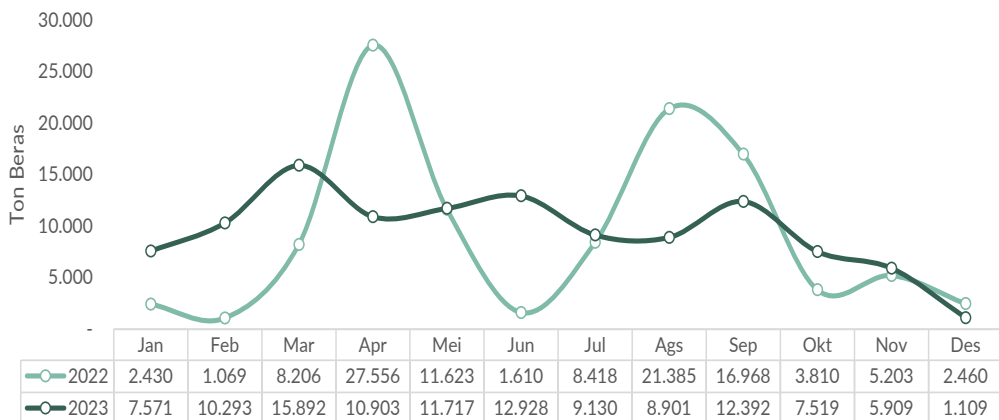
**"Luas panen padi dan produksi padi pada tahun 2023 diperkirakan masing-masing sebesar 49.323 hektar dan 200.115 ton GKG"**

Realisasi luas panen padi pada Januari-September 2023 sebesar 43.037 hektar atau mengalami penurunan 1.727 hektar (3,86 persen) dibandingkan Januari-September 2022. Potensi luas panen padi pada Oktober-Desember 2023 sekitar 6.286 hektar. Total luas panen padi 2023 diperkirakan sebesar 49.323 hektar atau menurun sekitar 419 hektar (0,84 persen) dibandingkan luas panen padi pada 2022 sebesar 49.742 hektar.

Produksi padi sepanjang Januari-September 2023 diperkirakan 174.656 ton GKG, atau naik 806 ton GKG (0,46 persen) dibandingkan 2022 sebesar 173.850 ton GKG. Produksi padi tertinggi pada 2023 terjadi pada bulan Maret sebesar 27.833 ton GKG dan terendah pada bulan Desember sebesar 1.942 ton GKG.

Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksi padi dari Januari-September 2023 setara dengan 99.727 ton beras. Potensi produksi beras Oktober-Desember 2023 sebesar 14.537 ton. Dengan demikian, total produksi beras pada 2023 diperkirakan sekitar 114.263 ton beras atau naik 3,18 persen dibandingkan 2022 sebesar 110.739 ton.

**Gambar 1. Produksi Beras Provinsi Papua Tahun 2022-2023\* (Ton)**



Keterangan: \* Produksi beras September-Desember 2023 adalah angka sementara  
Perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan angka

## PENJELASAN TEKNIS

- Penghitungan angka produksi padi tahun 2023 dilakukan dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA). Dengan metode tersebut dapat dihitung luas panen dan potensi luas panen di Provinsi Papua.
- Metode KSA memanfaatkan citra satelit yang berasal dari LAPAN dan digunakan BIG untuk mendelineasi luas bahan baku sawah yang divalidasi dan ditetapkan kementerian ATR untuk mengestimasi luas padi.
- Produksi padi diperoleh dari hasil perkalian antara antara luas panen (bersih) dikalikan dengan produktivitas. Produksi beras diperoleh dari hasil konversi produksi padi menjadi beras dengan menggunakan angka konversi gabah menjadi beras. Produksi padi dan beras dihitung pada level kabupaten dan kota.
- Luas panen padi dihitung berdasarkan pengamatan yang objektif menggunakan metode KSA yang dikembangkan BPPT, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang sekarang bergabung dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan BPS.



### SUMBER DATA

Data yang digunakan berasal dari  
Survei Ubinan dan KSA

# 2 ST2023 Takap 1 Papua

## “Jumlah usaha pertanian hasil ST2023 di Provinsi Papua sebanyak 73.736 unit”

Berdasarkan hasil pencacahan lengkap ST2023, jumlah usaha pertanian di Provinsi Papua tahun 2023 sebanyak 73.736 unit. Jenis usaha pertanian paling banyak berupa UTP sebanyak 73.676 unit (99,92 persen), sedangkan UPB sebanyak 27 unit (0,04 persen), dan UTL sebanyak 33 unit (0,04 persen).

UTP paling banyak terdapat di Kabupaten Jayapura dengan jumlah 15.373 unit atau 20,87 persen dari UTP di Provinsi Papua. Jumlah RTUP tahun 2023 sebanyak 71.214 rumah tangga atau naik 20,07 persen dibandingkan tahun 2013 yang sebanyak 59.310 rumah tangga. Rasio UTP terhadap RTUP 2023 sebesar 1,03 yang berarti bahwa pada 100 RTUP akan terdapat 103 UTP.

UPB di Provinsi Papua tahun 2023 sebanyak 27 unit, turun 18,18 persen dari tahun 2013 yang sebanyak 33 unit. UPB paling banyak terdapat di Kota Jayapura dengan jumlah 16 unit atau 59,26 persen dari UPB di Provinsi Papua. UTL di Provinsi Papua tahun 2023 sebanyak 33 unit, bertambah 22 unit (200 persen) dari tahun 2013 yang sebanyak 11 unit. UTL paling banyak terdapat di Kabupaten Jayapura dengan jumlah 19 unit atau 57,58 persen dari UTL di Provinsi Papua.

**Tabel 1. Jumlah RTUP, UPB, dan UTL Menurut Kabupaten/Kota, 2013 dan 2023**

Kabupaten/Kota (1)	Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) (rumah tangga)		Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPBO (unit)		Usaha Pertanian Lainnya (UTL) (unit)	
	2013 <sup>1</sup> (2)	2023 (3)	2013 <sup>1</sup> (4)	2023 (5)	2013 <sup>1</sup> (6)	2023 (7)
Jayapura	10.869	15.214	4	4	4	19
Kepulauan Yapen	8.303	9.394	1	1	-	6
Biak Numfor	12.857	13.297	2	1	1	1
Sarmi	4.571	4.645	-	2	-	-
Keerom	7.932	11.401	2	3	2	5
Waropen	2.683	4.837	-	-	1	-
Supiori	2.303	2.610	-	-	-	-
Mamberamo Raya	3.285	3.324	-	-	-	-
Kota Jayapura	6.507	6.392	24	16	3	2
PAPUA	59.310	71.214	33	27	11	33

Catatan: Pada ST2013, UTL dikonsepsikan sebagai Usaha Pertanian selain rumah tangga dan selain perusahaan (NRT).

<sup>1</sup> Data sudah tidak termasuk kabupaten-kabupaten yang membentuk wilayah Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan pada Tahun 2023



# ST2023 Tahap 1 Papua Selatan

## **“Jumlah usaha pertanian hasil ST2023 di Provinsi Papua Selatan sebanyak 67.656 unit”**

Berdasarkan hasil pencacahan lengkap ST2023, jumlah usaha pertanian di Provinsi Papua Selatan tahun 2023 sebanyak 67.656 unit. Jenis usaha pertanian paling banyak berupa UTP sebanyak 67.637 unit (99,97 persen), UPB sebanyak 17 unit (0,03 persen), dan UTL sebanyak 2 unit (0,00 persen).

UTP paling banyak terdapat di Kabupaten Merauke dengan jumlah 27.637 unit atau 40,86 persen dari UTP di Provinsi Papua Selatan. Jumlah RTUP tahun 2023 sebanyak 65.843 rumah tangga atau naik 27,50 persen dibandingkan tahun 2013 yang sebanyak 51.640 rumah tangga. Rasio UTP terhadap RTUP 2023 sebesar 1,03 yang berarti bahwa pada 100 RTUP akan terdapat 103 UTP.

UPB di Provinsi Papua Selatan tahun 2023 sebanyak 17 unit, naik 54,55 persen dari tahun 2013 yang sebanyak 11 unit. UPB paling banyak terdapat di Kabupaten Merauke dengan jumlah 15 unit atau 88,24 persen dari UPB di Provinsi Papua Selatan. UTL di Provinsi Papua Selatan tahun 2023 sebanyak 2 unit, berkurang 20 unit (90,91 persen) dari tahun 2013 yang sebanyak 22 unit. UTL terdapat di Kabupaten Merauke dengan jumlah 2 unit atau 100 persen dari UTL di Provinsi Papua Selatan.

**Tabel 2. Jumlah RTUP, UPB, dan UTL Menurut Kabupaten/Kota, 2013 dan 2023**

Kabupaten/Kota	Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) (rumah tangga)		Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPBO) (unit)		Usaha Pertanian Lainnya (UTL) (unit)	
	2013 <sup>1</sup>	2023	2013 <sup>1</sup>	2023	2013 <sup>1</sup>	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Merauke	21.645	26.477	9	15	8	2
Boven Digoel	4.399	7.099	1	2	1	-
Mappi	11.751	13.064	-	-	1	-
Asmat	13.845	19.203	1	-	12	-
PAPUA SELATAN	51.640	65.843	11	17	22	2

Catatan: Pada ST2013, UTL dikonsepsikan sebagai Usaha Pertanian selain rumah tangga dan selain perusahaan (NRT).

<sup>1</sup> Data merupakan gabungan dari kabupaten-kabupaten di Papua yang membentuk wilayah Provinsi Papua Selatan pada Tahun 2023.

# 4 ST2023 Tahap 1 Papua Tengah

## “Jumlah usaha pertanian hasil ST2023 di Provinsi Papua Tengah sebanyak 205.449 unit”

Berdasarkan hasil pencacahan lengkap ST2023, jumlah usaha pertanian di Provinsi Papua Tengah tahun 2023 sebanyak 205.449 unit. Jenis usaha pertanian paling banyak berupa UTP sebanyak 205.438 unit (99,995 persen), sedangkan UPB sebanyak 6 unit (0,003 persen), dan UTL sebanyak 5 unit (0,002 persen).

UTP paling banyak terdapat di Kabupaten Paniai dengan jumlah 43.170 unit atau 21,01 persen dari UTP di Provinsi Papua Tengah. Jumlah RTUP tahun 2023 sebanyak 204.439 rumah tangga atau naik 49,74 persen dibandingkan tahun 2013 yang sebanyak 136.529 rumah tangga. Rasio UTP terhadap RTUP 2023 sebesar 100 yang berarti bahwa pada 100 RTUP akan terdapat 100 UTP.

UPB di Provinsi Papua Tengah tahun 2023 sebanyak 6 unit, turun 40,00 persen dari tahun 2013 yang sebanyak 10 unit. UPB paling banyak terdapat di Kabupaten Nabire dengan jumlah 4 unit atau 66,67 persen dari UPB di Provinsi Papua Tengah. UTL di Provinsi Papua Tengah tahun 2023 sebanyak 5 unit, berkurang 3 unit (37,50 persen) dari tahun 2013 yang sebanyak 8 unit. UTL paling banyak terdapat di Kabupaten Nabire dengan jumlah 4 unit atau 80,00 persen dari UTL di Provinsi Papua Tengah.

**Tabel 3. Jumlah RTUP, UPB, dan UTL Menurut Kabupaten/Kota, 2013 dan 2023**

Kabupaten/Kota	Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) (rumah tangga)		Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPBO) (unit)		Usaha Pertanian Lainnya (UTL) (unit)	
	2013 <sup>1</sup>	2023	2013 <sup>1</sup>	2023	2013 <sup>1</sup>	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mimika	11.184	17.144	4	2	5	1
Dogiyai	18.979	27.868	-	-	-	-
Deiyai	15.002	21.421	-	-	-	-
Nabire	14.222	17.056	6	4	2	4
Paniai	29.390	43.152	-	-	-	-
Intan Jaya	8.167	29.438	-	-	-	-
Puncak	18.219	26.393	-	-	-	-
Puncak Jaya	21.364	21.967	-	-	1	-
PAPUA TENGAH	136.529	204.439	10	6	8	5

Catatan: Pada ST2013, UTL dikonsepsikan sebagai Usaha Pertanian selain rumah tangga dan selain perusahaan (NRT).

<sup>1</sup> Data merupakan gabungan dari kabupaten-kabupaten di Papua yang membentuk wilayah Provinsi Papua Tengah pada Tahun 2023.

# ST2023 Tahap 1 Papua Pegunungan



## “Jumlah usaha pertanian hasil ST2023 di Provinsi Papua Pegunungan sebanyak 221.168 unit”

Berdasarkan hasil pencacahan lengkap ST2023, jumlah usaha pertanian di Provinsi Papua Pegunungan tahun 2023 sebanyak 221.191 unit. Jenis usaha pertanian paling banyak berupa UTP sebanyak 221.189 unit, tidak terdapat UPB, dan UTL sebanyak 2 unit.

UTP di Provinsi Papua Pegunungan tahun 2023 sebanyak 221.189 unit. UTP paling banyak terdapat di Kabupaten Yahukimo jumlah 67.380 unit atau 30,46 persen dari UTP di Provinsi Papua Pegunungan. Jumlah RTUP tahun 2023 sebanyak 221,168 rumah tangga atau naik 15,69 persen dibandingkan tahun 2013 yang sebanyak 191.179 rumah tangga. Rasio UTP terhadap RTUP 2023 sebesar 100 yang berarti bahwa pada 100 RTUP akan terdapat 100 UTP.

Provinsi Papua Pegunungan tidak memiliki Usaha Pertanian Berbadan Hukum baik pada tahun 2023 maupun tahun 2013. UTL di Provinsi Papua tahun 2023 sebanyak 2 unit, berkurang 2 unit dari tahun 2013 yang UTL sebanyak 4 unit. UTL hanya terdapat di Kabupaten Jayawijaya dengan jumlah 2 unit atau 100 persen dari UTL di Provinsi Papua Pegunungan.

**Tabel 4. Jumlah RTUP, UPB, dan UTL Menurut Kabupaten/Kota, 2013 dan 2023**

Kabupaten/Kota	Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) (rumah tangga)		Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPBO) (unit)		Usaha Pertanian Lainnya (UTL) (unit)	
	2013 <sup>1</sup>	2023	2013 <sup>1</sup>	2023	2013 <sup>1</sup>	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nduga	18.967	27.665	-	-	-	-
Jayawijaya	39.066	34.964	-	-	2	2
Lanny Jaya	39.180	21.847	-	-	-	-
Tolikara	22.488	36.323	-	-	-	-
Mamberamo Tengah	6.963	4.957	-	-	-	-
Yalimo	9.409	12.842	-	-	-	-
Yahukimo	40.196	67.376	-	-	-	-
Pegunungan Bintang	14.910	15.194	-	-	2	-
PAPUA PEGUNUNGAN	191.179	221.168	-	-	4	2

Catatan: Pada ST2013, UTL dikonsepsikan sebagai Usaha Pertanian selain rumah tangga dan selain perusahaan (NRT).

<sup>1</sup> Data merupakan gabungan dari kabupaten-kabupaten di Papua yang membentuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan pada Tahun 2023.

## PENJELASAN TEKNIS

- Usaha Pertanian adalah unit usaha yang mengelola sumber daya alam nabat dan hewani untuk menghasilkan komoditas ekonomi yang seluruh atau sebagian hasilnya untuk dijual, minimal mencakup salah satu subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan/atau jasa pertanian.
- Usaha Pertanian Perorangan (UTP) adalah unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan/atau jasa pertanian.
- Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) adalah bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor pertanian yang bersifat tetap, terus menerus, yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau ijin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan budidaya pertanian seperti pemupukan, pemeliharaan, dan pemanenan.
- Usaha Pertanian Lainnya (UTL) adalah unit usaha pertanian yang dikelola oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian, yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial/ekonomi/sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha pertanian secara bersama pada satu hamparan atau kawasan tertentu.
- Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) adalah rumah tangga yang memelihara/menguasai/melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar, termasuk tanaman pangan yang hanya dikonsumsi sendiri.



**SUMBER DATA**  
Data yang digunakan berasal dari  
Sensus Pertanian (ST) 2023











# Penduduk

**“TFR Papua berdasarkan hasil Long Form SP2020 mencapai 2,76”**

## **1. Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)**

Berdasarkan data *Long Form SP2020*, Angka Kelahiran Total (TFR) Papua mencapai 2,76. Angka ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 2-3 anak yang dilahirkan selama masa reproduksinya. Angka TFR mengalami penurunan dibandingkan pendataan hasil Sensus Penduduk pada tahun 1971 sebesar 7,21. Meskipun mengalami penurunan, TFR Papua menempati urutan kedua setelah Provinsi NTT sebesar 2,79.

## **2. Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur Tertentu (ASFR)**

Jika dikelompokkan berdasarkan kelompok umur tertentu, ASFR di Papua membentuk huruf U terbalik. Artinya pada kelompok usia muda, anak yang dilahirkan rendah. Puncak ASFR Papua berada pada kelompok umur 20-24 tahun dimana tercatat 135 kelahiran dari 1.000 penduduk.

## **3. Angka Kelahiran Kasar/Crude Birth Rate (CBR)**

Hasil *Long Form SP2020* tercatat 22,03 kelahiran hidup dari 1.000 penduduk Papua.

## **4. Mortalitas**

Angka Kematian Ibu di Papua sebesar 565 artinya terdapat 565 kematian perempuan saat hamil, melahirkan, atau masa nifas pada 1.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi di Papua mencapai 38 dari 1.000 kelahiran. Angka ini mengalami penurunan dari 57 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 38 per 1.000 kelahiran.

Angka Kematian Anak (usia 1-4 tahun) tercatat sebesar 10,88 artinya terdapat 10-11 kematian anak pada balita usia 1-4 tahun selama 1 tahun pada 1.000 balita. Angka Kematian Balita (dibawah 5 tahun) tercatat sebesar 49,04 artinya setiap 1.000 balita di Papua, 49-50 balita tidak berhasil mencapai umur tepat 5 tahun.

## 5. Migrasi

Migrasi Masuk di Papua mencapai 10,96 artinya 11 dari 100 penduduk Papua tinggal di luar tempat kelahirannya. Untuk migrasi keluar di Papua mencapai 2,83. Migrasi risen di Papua mencapai 0,98 artinya 1 dari 100 penduduk di Papua tinggal di Provinsi lain dalam 5 tahun terakhir.

## 6. Komuter

Di Papua, terdapat 0,14 persen komuter antar kabupaten/kota di Papua. Hal ini menunjukkan bahwa 1 orang dari 100 orang penduduk di Papua berusia 5 tahun keatas beraktivitas di luar kabupaten/kota tempat tinggalnya dan pergi pulang pada hari yang sama. Sebagian besar komuter berjenis kelamin laki-laki. (60,88 persen).

## 7. Disabilitas

Long Form SP2020 juga mencatat informasi mengenai disabilitas. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan prevalensi disabilitas antara desa/kota maupun berdasarkan jenis kelamin.

## 8. Indikator Perumahan

Rumah tangga yang menempati rumah yang memenuhi syarat ketahanan bangunan sebesar 72,27 persen. Dilihat menurut wilayah perkotaan maupun pedesaan, ketahanan bangunan di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan.

Persentase rumah tangga yang menempati rumah yang memenuhi ketahanan bangunan terdiri dari atap, dan lantai masing-masing sebesar 76,72 %; 98,32 %; dan 83,15 %.



### SUMBER DATA

Data yang digunakan berasal dari Hasil Long Form SP2020

## PENJELASAN TEKNIS

- TFR adalah jumlah dari angka kelahiran menurut kelompok umur dan merupakan ringkasan ukuran dari tingkat fertilitas. Angka ini menggambarkan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita pada akhir masa reproduksinya
- ASFR menunjukkan banyaknya kelahiran pada perempuan kelompok umur tertentu per 1.000 perempuan pada kelompok umur tersebut.
- Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate* atau CBR) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama.
- Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan, tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan.
- Angka Kematian Bayi (AKB) adalah kematian yang terjadi pada penduduk yang berumur 0-11 bulan (kurang dari 1 tahun).
- Migrasi merupakan kegiatan perpindahan penduduk antar wilayah dalam jangka waktu tertentu, dengan melibatkan perubahan tempat tinggal. Penduduk yang wilayah tempat tinggalnya pada saat pelaksanaan sensus/survei berbeda dengan wilayah tempat lahir merupakan migran seumur hidup. Besaran migran seumur hidup dalam suatu populasi dikenal sebagai angka migrasi seumur hidup.
- Komuter/pelaju adalah seseorang yang melakukan suatu kegiatan bekerja/bersekolah dikabupaten/kota yang berbeda dengan tempat tinggalnya dan secara rutin pergi-pulang (pp)/nglaju/ulang alik pada hari yang sama.
- Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Undang-Undang No. 8 Tahun 2016).

# Kemiskinan **7**

## **"Persentase penduduk miskin Provinsi pada Maret 2023 sebesar 26,03 persen, turun 0,77 persen poin dibanding September 2022"**

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua pada Maret 2023 mencapai 915,15 ribu orang. Dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin menurun 21,2 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2021, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 8,17 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebesar 26,80 persen, naik 0,24 persen poin terhadap Maret 2022 dan turun 0,58 persen poin terhadap September 2021.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2022–Maret 2023, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 4,6 ribu orang sedangkan di perdesaan turun sebesar 25,8 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik 0,39 persen poin dari 5,29 persen di September 2022 menjadi 5,68 persen pada Maret 2023. Persentase kemiskinan di perdesaan, turun 4,49 persen poin dari 35,68 persen pada September 2022 menjadi 34,49 persen pada Maret 2023.

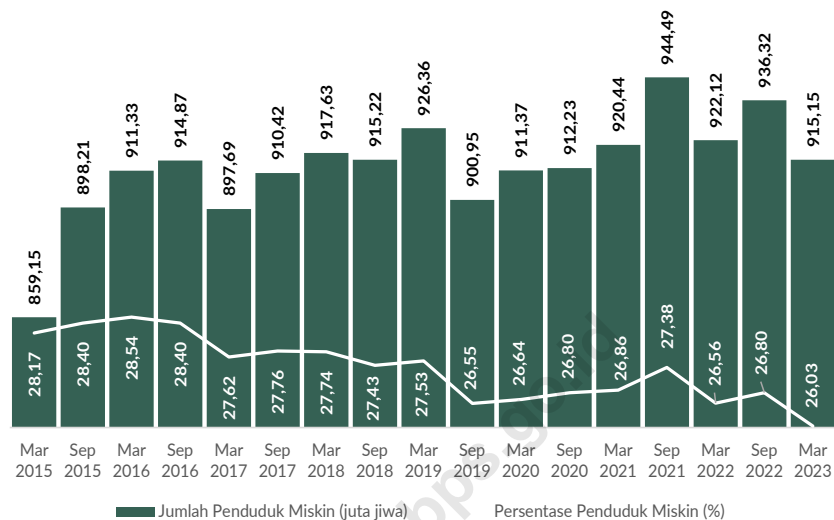
Provinsi Papua merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi sebesar 26,80 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin terendah di Provinsi Bali, yaitu sebesar 4,25 persen. Secara nasional, persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 25,89 juta orang.

Garis Kemiskinan pada Maret 2023 adalah sebesar Rp 669.469,- per kapita per bulan. Dibandingkan September 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,55 persen. Sementara jika dibandingkan Maret 2022, terjadi kenaikan sebesar 9,10 persen.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan baik di perkotaan maupun perdesaan. Pada Maret 2023 sumbangan GKM terhadap GK perkotaan sebesar 67,98 persen dan terhadap GK perdesaan sebesar 78,60 persen. Sedangkan GKNM



Gambar 2. Penduduk Miskin Provinsi Papua Maret 2015–Maret 2023



terhadap GK perkotaan dan perdesaan masing-masing hanya menyumbang sebesar 32,01 persen dan 21,40 persen.

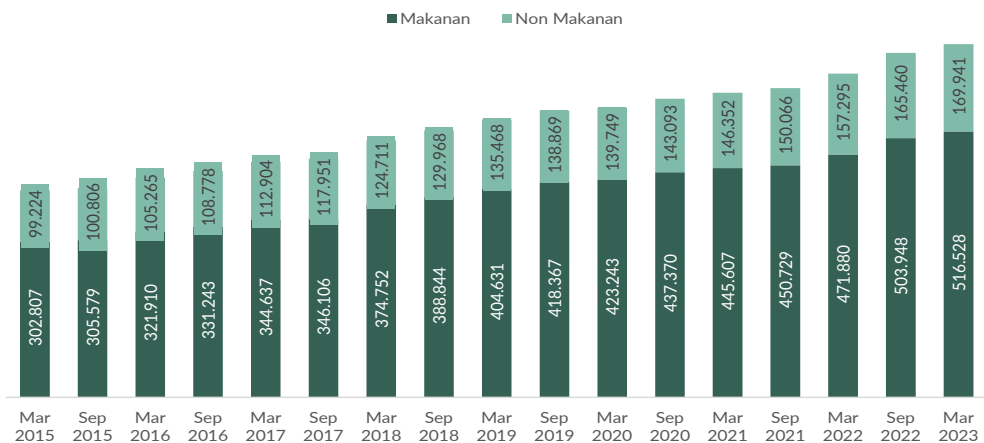
Garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Secara rata-rata, rumah tangga miskin di Provinsi Papua memiliki anggota rumah tangga sebanyak 4 hingga 5 orang (4,98 orang). Dengan garis kemiskinan sebesar Rp 686.469,- maka rata-rata garis kemiskinan per rumah tangga pada Maret 2023 adalah sebesar Rp3.418.616,-/bulan naik sebesar 8,94 persen dibanding kondisi September 2022 yang sebesar Rp3.112.747,-/bulan.

Pada periode September 2022-Maret 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2022 sebesar 7,285 turun 1,001 menjadi 6,284 pada Maret 2023 dan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan dari 2,818 menjadi 2,149.

**Tabel 5. Garis Kemiskinan Menurut Klasifikasi Wilayah di Provinsi Papua  
Maret 2015–Maret 2023**

Periode (1)	Garis Kemiskinan (Per Kapita Per Bulan)		
	Kota (2)	Desa (3)	K+D (4)
Mar-15	440.697	388.095	402.031
Sep-15	445.057	392.446	406.385
Mar-16	466.985	412.991	427.176
Sep-16	479.294	425.264	440.021
Mar-17	498.368	441.287	457.541
Sep-17	508.403	446.994	464.056
Mar-18	542.542	482.000	499.643
Sep-18	566.903	499.615	518.811
Mar-19	588.744	520.117	540.099
Sep-19	603.458	538.088	557.236
Mar-20	611.115	542.695	562.992
Sep-20	622.346	562.412	580.463
Mar-21	634.703	573.510	591.959
Sep-21	643.071	582.157	600.795
Mar-22	676.775	608.205	629.175
Sep-22	723.346	646.116	669.408
Mar-23	743.289	661.946	686.469

**Gambar 3. Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan Provinsi Papua Mar 2015–Mar 2023 (rupiah)**



## PENJELASAN TEKNIS

- Pengukuran kemiskinan berdasarkan konsep memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur melalui garis kemiskinan.
- Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
- Garis kemiskinan terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan garis kemiskinan dilakukan berdasarkan daerah perkotaan dan pedesaan.
- Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kalori per kapita per hari yang diwakili 52 jenis komoditas. Garis Kemiskinan Bukan Makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.
- Indeks kedalaman kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menggambarkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.
- Garis kemiskinan per rumah tangga dihitung dari garis kemiskinan per kapita dikalikan dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin.



### SUMBER DATA

Data yang digunakan berasal dari data SUSENAS MARET 2022



# Ketimpangan 8

## **"Gini Ratio Maret 2023 tercatat sebesar 0,386"**

Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Papua yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,386. Angka ini menurun sebesar 0,007 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* September 2022 yang sebesar 0,393.

*Gini Ratio* di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,300 naik dibanding *Gini Ratio* September 2022 yang sebesar 0,294 dan turun jika dibandingkan *Gini Ratio* Maret 2022 yang sebesar 0,315. Sementara itu, *Gini Ratio* di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,403 turun dibanding *Gini Ratio* September 2022 yang sebesar 0,419 dan sama dengan *Gini Ratio* Maret 2022 yang sebesar 0,427.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, pada Maret 2023 distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 16,38 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan sedang/menengah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 21,77 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 16,16 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan sedang/menengah.

*Gini Ratio* jika dilihat menurut provinsi, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai nilai *Gini Ratio* tertinggi yaitu sebesar 0,449. Sementara *Gini Ratio* terendah tercatat di Provinsi Bangka Belitung dengan *Gini Ratio* sebesar 0,245. Jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* nasional yang sebesar 0,388, terdapat enam provinsi dengan angka *Gini Ratio* lebih tinggi, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (0,449), DKI Jakarta (0,431), Jawa Barat (0,425), Gorontalo (0,417).

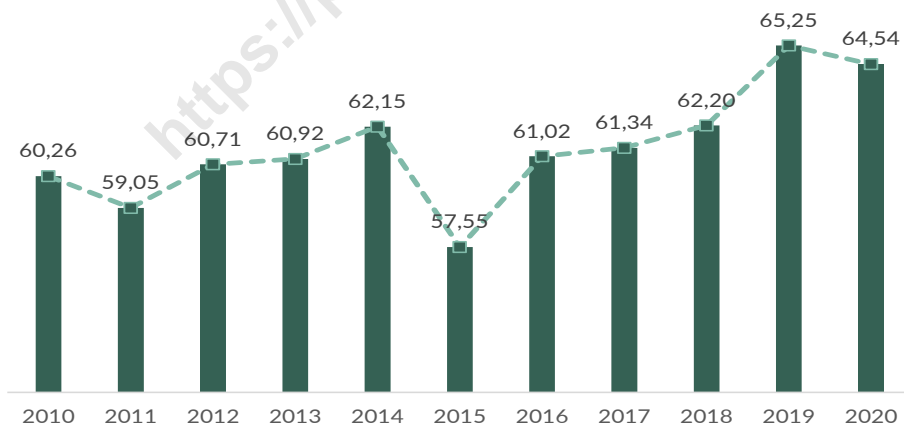
# 9 Indeks Demokrasi Indonesia

**"IDI Provinsi Papua 2020 mencapai angka 64,54 yang berarti bahwa capaian kinerja demokrasi Indonesia pada kategori sedang"**

IDI Provinsi Papua tahun 2020 sebesar 64,54 turun 0,71 poin dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 65,25. Kondisi ini menempatkan kinerja demokrasi Papua masih berada pada kategori 'sedang'.

IDI dari 2019–2020, aspek Kebebasan Sipil merupakan satu-satunya yang mengalami penurunan sebesar 3,76 poin (dari 93,08 menjadi 89,32), sedangkan aspek Hak-hak Politik meningkat sebesar 0,67 poin (dari 51,16 menjadi 51,83) dan aspek Lembaga Demokrasi juga meningkat sebesar 0,93 poin (dari 52,61 menjadi 53,54).

**Gambar 4. Indeks Demokrasi Provinsi Papua, 2010-2020**



## PENJELASAN TEKNIS

- Aspek demokrasi yang dihitung dalam penyusunan IDI adalah Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).
- Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data diantaranya, *review* surat kabar lokal, *review* dokumen (Perda, Pergub,dll), *Focus Grup Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam.

# Ketenagakerjaan **10**

## **"Agustus 2023, TPAK Papua sebesar 77,20 persen dan TPT sebesar persen"**

Penduduk usia kerja pada Agustus 2023 sebanyak 3,26 juta orang, naik sebanyak 698,48 ribu orang dibandingkan Agustus 2022. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu 2,52 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 743 ribu orang.

TPAK Papua pada Agustus 2023 sebesar 77,20 persen, turun 0,55 persen poin dibanding Agustus 2022. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 86,64 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 66,27 persen. Dibandingkan Agustus 2022, TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 1,15 persen poin sedangkan TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 2,82 persen poin.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Papua pada Agustus 2023 sebesar 2,67 persen, turun 0,16 persen poin dibandingkan kondisi Agustus 2022. TPT laki-laki sebesar 2,82 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan sebesar 2,44 persen. TPT laki-laki memiliki pola yang sama dengan TPT Papua yaitu turun dibandingkan Agustus 2022 sebesar 0,52. Sedangkan TPT perempuan naik 0,32 dibandingkan dengan Agustus 2022

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT pada Agustus 2023 mempunyai pola yang hampir sama dengan Agustus 2022, namun terdapat penurunan yang cukup tajam pada pendidikan diploma I/II/III. Dari Agustus 2021 hingga Agustus 2023, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 6,62 persen pada Agustus tahun 2023. Sementara itu, TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD kebawah, yaitu sebesar 1,16 persen.

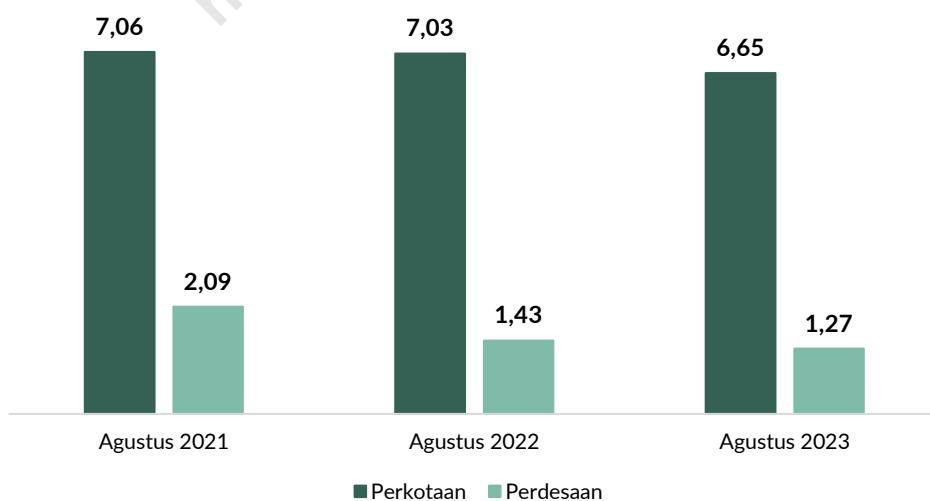
Dibandingkan Agustus 2022, penurunan TPT terjadi pada hampir semua tingkat pendidikan, dengan penurunan terbesar pada tingkat diploma I/II/III, yaitu sebesar 5,84 persen poin. Sementara itu, tingkat pendidikan SD ke bawah dan Diploma IV, S1, S2, S3 mengalami peningkatan TPT, masing-masing sebesar 0,3 persen poin dan 2,05 persen poin.



**Tabel 6. Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja TPT dan TPAK di Provinsi Papua**

Status Keadaan Ketenagakerjaan (1)	Agustus 2021 (2)	Agustus 2022 (3)	Agustus 2023 (4)
Penduduk Usia Kerja (ribu jiwa)	2.494,15	2.560,75	3.259,23
Angkatan Kerja (ribu jiwa)	1.952,78	1.991,10	2.516,13
Bekerja (ribu jiwa)	1.887,78	1.934,77	2.448,95
Penganggur (ribu jiwa)	65,00	56,33	67,18
Bukan Angkatan Kerja (ribu jiwa)	541,37	569,65	743,10
TPT (%)	3,33	2,83	2,67
Laki-laki (%)	3,75	3,34	2,82
Perempuan (%)	2,74	2,12	2,44
TPAK (%)	78,29	77,75	77,20
Laki-laki (%)	86,41	85,49	86,64
Perempuan (%)	69,10	69,09	66,27

**Gambar 5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Klasifikasi Wilayah Agustus 2021 - Agustus 2023 (%)**



## PENJELASAN TEKNIS

- Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik mengacu *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh *International Labor Organization* (ILO). Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja.
- Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Penduduk usia kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif di pasar kerja, baik dengan bekerja, mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Ukuran ini merupakan indikasi relatif dari pasokan tenaga kerja tersedia yang terlibat dalam produksi barang dan jasa.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase pengangguran terhadap angkatan kerja.



# 11 Indeks Pembangunan Manusia

## **"IPM Provinsi Papua tahun 2023 sebesar 63,01 dengan status pembangunan berada di kategori sedang"**

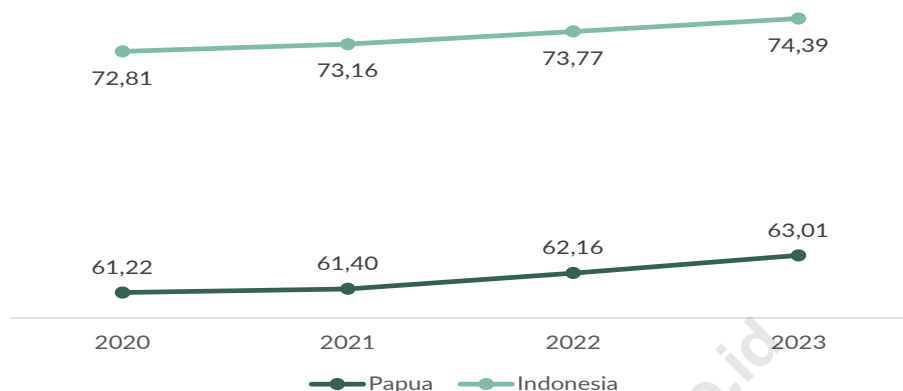
Pembangunan manusia di Papua terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Papua berada di level "sedang". Selama 2020–2023, IPM Provinsi Papua rata-rata meningkat sebesar 0,97 persen per tahun, dari 61,22 pada tahun 2020 menjadi 63,01 pada tahun 2023.

Peningkatan IPM tahun 2023 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Dua indikator mengalami percepatan pertumbuhan yaitu Pengeluaran Riil per Kapita sebesar 5,82 persen dibanding tahun sebelumnya 2,75 persen. Sementara Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) pertumbuhannya sedikit melambat dari 0,38persen menjadi 0,28 persen. Demikian juga Harapan Lama Sekolah (HLS) melambat dari 0,27 persen menjadi 0,09 persen dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pertumbuhannya melambat dari 3,85 persen menjadi 1,85 persen.

Selama 2020-2023, UHH telah meningkat sebesar 0,58 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,19 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Papua adalah 67,59 tahun dan pada tahun 2023 mencapai 68,72t ahun. UHH tahun 2023 meningkat 0,19 tahun (0,28 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan rata-rata 2021-2022 (0,29 persen).

Pada komponen pendidikan selama periode 2020-2023, HLS Papua rata-rata meningkat 0,21 persen per tahun, sementara RLS meningkat 2,25 persen per tahun. HLS tahun 2023 meningkat 0,01 tahun (0,09 persen) dibandingkan tahun 2022, melambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,27 persen). Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2023, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Papua mencapai Rp7,562 juta per tahun. Capaian ini meningkat 416 ribu rupiah (5,82 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dbandingkan

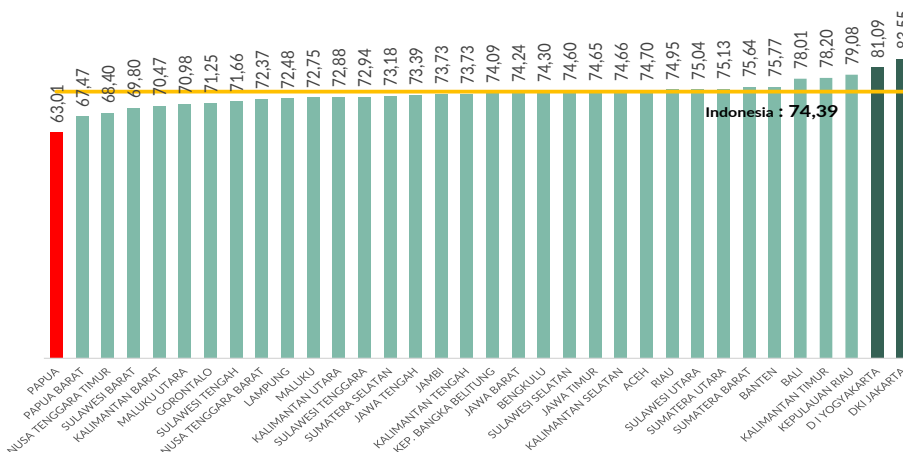
**Gambar 6. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Nasional dan Papua Tahun 2020–2023**



rata-rata pertumbuhan 2020-2022 yang sebesar 1,38 persen per tahun.

Jika dilihat pencapaian pembangunan manusia di tingkat provinsi, ada beberapa provinsi yang berubah status IPM pada periode 2020-2023. Pada tahun 2023, status pembangunan manusia di Kalimantan Barat meningkat dari “sedang” menjadi “tinggi”, dengan capaian IPM 70,47. Selain Kalimantan Barat, dalam kurun waktu 2020-2023 peningkatan status dari “sedang” ke “tinggi” juga dialami Gorontalo dan Maluku Utara yaitu sejak 2022. Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut, jumlah provinsi dengan status pembangunan manusia yang “tinggi” ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ ) menjadi sebanyak 28, dengan status “sedang” ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ ) sebanyak 4, dan tidak ada provinsi dengan status “rendah” ( $\text{IPM} < 60$ ). Sementara itu, DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta menjadi provinsi dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi” ( $\text{IPM} \geq 80$ ).

**Gambar 7. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Indonesia, 2023**





## PENJELASAN TEKNIS

- Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging people's choice). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan antara lain dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan backcasting sejak tahun 2010.
- IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life); pengetahuan (knowledge); dan standar hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan dengan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.
- Dimensi pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Dimana Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal, dan Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sementara itu, standar hidup layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.
- Status pembangunan manusia dibedakan atas 4 yaitu Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang dan Rendah.



# Indeks Kebahagiaan **12**

## **"Indeks Kebahagiaan Provinsi Papua tahun 2021 sebesar 69,87"**

Indeks Kebahagiaan Provinsi Papua tahun 2021 sebesar 69,87, lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yang hanya 67,52. Jika dilihat dari masing-masing dimensi penyusunnya, Indeks Kepuasan Hidup tahun 2021 sebesar 73,23, lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yang hanya 71,07. Demikian juga dengan masing-masing subdimensinya, Subdimensi Kepuasan Hidup Personal tahun 2021 sebesar 68,95 lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yang hanya 65,98 dan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial tahun 2021 sebesar 77,50, lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 sebesar 76,16. Sedangkan pada Indeks Perasaan (*Affect*) tahun 2021 sebesar 63,72, justru lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 68,59. Demikian juga dengan Indeks Dimensi Makna Hidup (*Eudaimonia*) tahun 2021 sebesar 72,07, lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 72,23. Seluruh indeks diukur pada skala 0-100.

## **PENJELASAN TEKNIS**

- Indeks Kebahagiaan Provinsi Papua merupakan indeks komposit yang dihitung secara tertimbang menggunakan dimensi dan indikator dengan skala 0-100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan penduduk yang semakin bahagia. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka semakin merasa tidak bahagia.
- Indeks kebahagiaan tahun 2021 diukur dengan tolok ukur tahun 2017. Penilaian terhadap tingkat kebahagiaan memerlukan sebuah kerangka kerja yang mencakup 19 (sembilan belas) indikator, yang tercakup dalam 3 (tiga) dimensi kehidupan, yaitu (1) Dimensi Kepuasan Hidup (*Life Satisfaction*), (2) Dimensi Perasaan (*Affect*), dan (3) Dimensi Makna Hidup (*Eudaimonia*). Dimensi kepuasan hidup dibedakan menjadi subdimensi kepuasan hidup personal dan kepuasan hidup sosial. Sehingga, hasil indeks pada tahun 2021 ini memiliki keterbandingan dengan tahun 2017, namun tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2014, karena memiliki nilai kontribusi yang berbeda antar indikator.



**Tabel 7. Indeks Kebahagiaan dan Indeks Dimensi Menurut Karakteristik 2021**

Karakteristik	Indeks Kebahagiaan	Penyusun Indeks Kebahagiaan				
		Indeks Dimensi Kepuasan Hidup			Indeks Dimensi Perasaan (Affect)	Indeks Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia)
		Indeks Subdimensi Kepuasan Hidup		Total		
(1)	(2)	Personal	Sosial	(5)	(6)	(7)
<b>Klasifikasi Wilayah</b>						
Perkotaan	72,83	74,10	78,96	76,53	65,66	75,62
Perdesaan	68,72	66,95	76,92	71,94	62,97	70,69
<b>Jenis Kelamin</b>						
Laki-Laki	69,47	67,83	76,85	72,34	64,00	71,56
Perempuan	70,73	71,39	78,90	75,15	63,13	73,19
<b>Status Perkawinan</b>						
Belum Menikah	69,72	70,28	76,58	73,43	61,21	73,73
Menikah	70,24	69,27	77,72	73,49	64,31	72,36
Cerai Hidup	66,84	66,77	75,66	71,21	58,71	69,82
Cerai Mati	68,32	67,11	76,82	71,97	62,00	70,37
<b>Kelompok Umur</b>						
≤ 24 Tahun	68,56	66,47	77,09	71,78	62,60	70,73
25-40 Tahun	69,34	68,62	76,60	72,61	62,94	71,84
41-64 Tahun	70,35	69,29	78,13	73,71	64,50	72,26
≥ 65 Tahun	70,51	69,94	79,25	74,59	63,20	73,02
<b>Kedudukan Dalam Rumah Tangga:</b>						
Kepala Rumah Tangga	69,42	67,96	77,02	72,49	63,66	71,55
Pasangan KRT	71,77	73,11	79,51	76,31	63,97	74,25
<b>Banyaknya Anggota Rumah Tangga:</b>						
1 Orang	67,69	67,18	74,83	71,01	60,70	70,71
2 Orang	69,25	69,43	77,25	73,34	62,38	71,36
3 Orang	69,36	67,89	77,12	72,51	63,79	71,26
4 Orang	70,59	69,65	77,32	73,48	64,95	72,78
5 Orang atau Lebih	70,57	69,38	78,70	74,04	64,25	72,82
<b>Pendidikan Tertinggi</b>						
Tidak pernah sekolah	66,15	62,38	75,25	68,82	61,23	67,92
Tidak tamat SD/ sederajat	70,68	68,03	79,23	73,63	66,19	71,78
SD sederajat	69,89	69,27	78,37	73,82	63,16	72,03
SMP sederajat	68,73	67,08	75,67	71,37	63,96	70,38
SMA sederajat	71,87	73,38	78,55	75,96	63,91	74,96
Diploma I, II, III	72,06	75,71	77,59	76,65	60,67	77,81
Diploma IV/S1	76,89	80,09	80,75	80,42	69,89	79,69
S2, S3	82,69	83,72	87,85	85,79	75,95	85,68
<b>Pendapatan Rata</b>						
Hingga Rp 1.800.000	66,68	61,38	76,04	68,71	62,91	68,05
Rp 1.800.001 - Rp 3.000.000	70,38	69,00	78,50	73,75	64,38	72,43
Rp 3.000.001 - Rp 4.800.000	70,38	70,91	77,71	74,31	63,30	72,85
Rp 4.800.001 - Rp 7.200.000	72,16	75,54	77,92	76,73	63,63	75,31
Lebih Dari Rp. 7.200.000	73,74	77,50	78,53	78,02	65,64	76,79
Papua	69,87	68,95	77,50	73,23	63,72	72,07

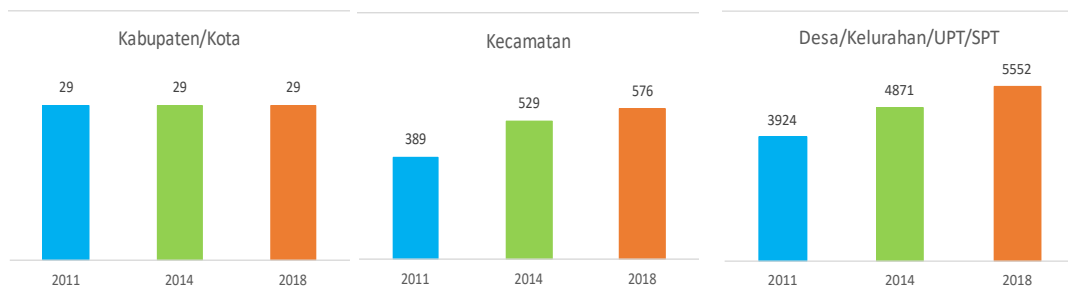
# Potensi Desa (PODES) 13

**"Tahun 2018, di Provinsi Papua terdapat 5.456 desa, 96 kelurahan, 576 kecamatan, dan 29 kabupaten/kota"**

Jumlah desa mandiri di Provinsi Papua sebanyak 10 desa (0,18 persen), 693 desa berkembang (12,70 persen), dan 4.753 desa tertinggal (87,12 persen). Rata-rata IPD Provinsi Papua untuk Dimensi Transportasi 56,96; Dimensi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 52,30; Dimensi Pelayanan Umum 41,67 persen; Dimensi Pelayanan Dasar 25,05; dan Dimensi Kondisi Infrastruktur 18,49.

Podes 2018 mencatat ada 40 desa wisata di Provinsi Papua, meningkat dari tahun 2014 yang hanya 17 desa wisata. Pada bidang ekonomi, peningkatan terjadi pada desa/kelurahan yang memiliki Industri Kecil dan Mikro. Peningkatan terbesar terjadi pada Industri Makanan dan Minuman sebesar 77 persen (menjadi 244 desa/kelurahan). Pada sarana ekonomi lainnya juga terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2014. Desa/kelurahan dengan keberadaan warung/toko kelontong, pasar dengan bangunan (permanen dan semi permanen), hotel/penginapan, toko/warung kelontong.

**Gambar 8. Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan UPT/SPT Hasil PODES Provinsi Papua Tahun 2011, 2014 dan 2018**

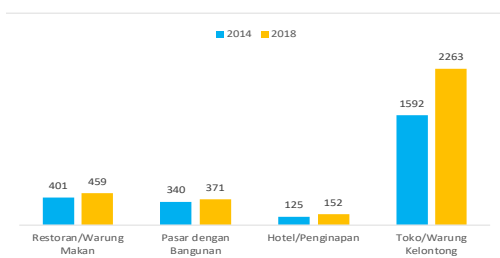


Pada bidang kesehatan, desa dengan penyelenggaraan kegiatan posyandu sebulan sekali meningkat 18 persen dibandingkan tahun 2014 menjadi 2.012 desa/kelurahan. Desa/kelurahan dengan keberadaan puskesmas dan puskesmas pembantu masing-masing meningkat 9 persen (menjadi 422 desa/kelurahan) dan 17 persen (menjadi 1.146 desa/kelurahan). Pada bidang perumahan dan lingkungan hidup ada beberapa peningkatan dibandingkan tahun 2014. Desa dengan/kelurahan dengan keberadaan pengguna listrik meningkat 39 persen (menjadi 4.050 desa/kelurahan). Desa/kelurahan

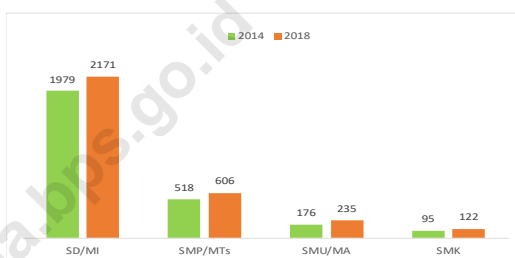
dengan keberadaan pengguna sumber air bersih untuk minum meningkat 12 persen (menjadi 3.906 desa/kelurahan). Desa/kelurahan dengan keberadaan pengguna jamban sebagai fasilitas buang air besar meningkat sebesar 44 persen (menjadi 3.020 desa/kelurahan).

Pada bidang pendidikan, desa dengan keberadaan SD/MI sampai dengan SMU/MA dan SMK mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi pada keberadaan SMU/MA. Dari segi pendidikan kepala desa/lurah, ada 1.817 kepala desa/lurah berpendidikan minimal SMU/ sederajat (meningkat 33 persen dibandingkan tahun 2014).

**Gambar 9. Perkembangan Sarana Sektor Ekonomi Provinsi Papua, 2014 dan 2018**



**Gambar 10. Perkembangan Sarana Sektor Pendidikan Provinsi Papua, 2014 dan 2018**



## PENJELASAN TEKNIS

- Podes 2018 dilaksanakan pada Mei 2018 secara sensus terhadap seluruh Desa/ Kelurahan/Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT), Kecamatan, Kabupaten/Kota. Wilayah tersebut harus memenuhi tiga (3) syarat, yaitu: 1) ada wilayah 2) ada penduduk, dan 3) ada pemerintahan desa.
- Indeks Pembangunan Desa (IPD) adalah indeks komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa pada suatu waktu. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Indeks Pembangunan Desa terdiri dari lima (5) dimensi yaitu 1) Pelayanan Dasar, 2) Kondisi Infrastruktur, 3) Aksesibilitas/Transportasi, 4) Pelayanan Umum, dan 5) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Tingkat perkembangan desa menurut IPD dikategorikan kedalam tiga (3) status yaitu: Desa Mandiri, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal. Semakin tinggi IPD menunjukkan semakin mandiri desa tersebut.
- Data podes 2018 berupa potensi desa/kelurahan yang disajikan terkait bidang pariwisata yaitu potensi wisata di desa/kelurahan, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang perumahan dan lingkungan hidup serta bidang pendidikan.

# Indeks Ketimpangan Gender **14**

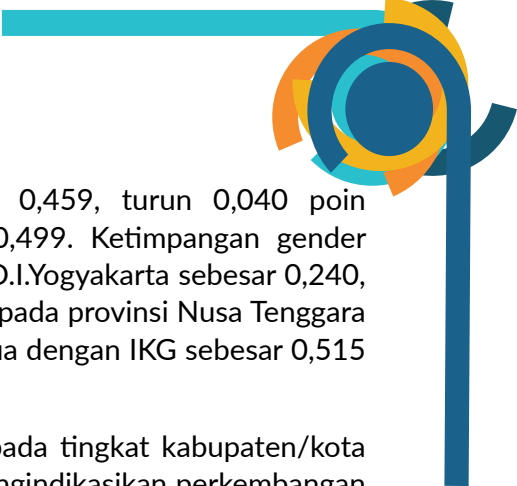
**"Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Papua tahun 2022 sebesar 0,515, turun 0,020 poin dibandingkan 2021"**

Ketimpangan gender Papua sejak tahun 2018 hingga 2022 secara konsisten menurun. Sejak tahun 2018, IKG berkurang sebesar 0,035 poin, rata-rata turun 0,00875 poin per tahun. Hal ini mengindikasikan ketimpangan gender yang semakin mengecil atau kesetaraan yang semakin membaik.

Penurunan ketimpangan gender terbesar terjadi pada tahun 2022 yang turun 0,020 poin dan utamanya dipengaruhi oleh menurunnya ketimpangan pada dimensi kesehatan reproduksi dan pemberdayaan. Pada dimensi kesehatan reproduksi, indikator wanita melahirkan tidak di fasilitas kesehatan turun dari 34,8 persen tahun 2021 menjadi 28,2 persen pada tahun 2022. Sedangkan pada dimensi pemberdayaan, keterwakilan perempuan di legislatif meningkat dari 14,55 persen pada tahun 2021 menjadi 15,94 persen pada tahun 2022. Persentase perempuan 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas meningkat dari 26,44 persen tahun 2021 menjadi 30,80 persen pada tahun 2022 dan persentase laki-laki meningkat dari 36,70 persen pada tahun 2021 menjadi 38,80 persen pada tahun 2022.

**Gambar 11. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Papua, 2018-2022**





Pada tahun 2022, IKG Indonesia sebesar 0,459, turun 0,040 poin dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 0,499. Ketimpangan gender paling rendah pada tahun 2022 dicapai oleh D.I.Yogyakarta sebesar 0,240, sedangkan ketimpangan gender tertinggi ada pada provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 0,648. Sementara provinsi Papua dengan IKG sebesar 0,515 ada pada urutan ke-26.

Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) pada tingkat kabupaten/kota di Papua selama kurun waktu 2018-2022 mengindikasikan perkembangan ketimpangan gender yang semakin baik. Sebagian besar kabupaten/kota setiap tahun mengalami penurunan ketimpangan gender.

Pada tahun 2022, sebanyak 18 kabupaten/kota mengalami penurunan ketimpangan gender. Nduga mengalami penurunan ketimpangan gender paling tinggi, terutama disebabkan oleh perbaikan dimensi pemberdayaan. Keterwakilan legislatif perempuan pada tahun 2022 meningkat sebesar 8,00 persen poin dan persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas meningkat sebesar 2,50 persen poin, sementara laki-laki meningkat 0,35 persen poin.

## PENJELASAN TEKNIS

- Penghitungan Indes Ketimpangan Gender (IKG) mengadopsi penghitungan *Gender Inequality Index (GII)* dari *United Nations Development Programme (UNDP)* dengan beberapa penyesuaian. Indikator *Maternal Mortality Rate (MMR)* atau *Angka Kematian Ibu (AKI)* didekati dengan indikator proporsi perempuan 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (*MTF*). Untuk indikator *Adolecent Birth Rate (ABR)* yang digunakan oleh UNDP dalam penghitungan *GII* didekati dengan indikator proporsi perempuan berusia 15-49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (*MHPK20*). Sementara itu, 3 (tiga) indikator lainnya sama dengan yang digunakan oleh UNDP dalam menyusun *GII*, yaitu persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas, persentase anggota legislatif, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (*TPAK*).
- Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator *MTF* dan *MHPK20*, dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas dan persentase anggota legislatif, dan dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator *TPAK*.



# EKONOMI DAN PERDAGANGAN







# 15 Inflasi Kota Jayapura

***"November 2023, inflasi mtm sebesar 0,10 persen, inflasi ytd sebesar 0,87 persen dan inflasi yoy sebesar -0,15 persen"***

Pada Oktober 2023, terjadi inflasi yoy di Kota Jayapura sebesar 1,82 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 110,97 pada November 2022 menjadi 112,99 pada November 2023. Tingkat inflasi mtm sebesar 0,10 persen dan tingkat inflasi ytd sebesar 0,87 persen.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran pada: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,35 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,63 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,05 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,46 persen; kelompok transportasi sebesar 4,23 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,78 persen; kelompok pendidikan sebesar 5,18 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,13 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,40 persen.

Beberapa komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy pada November 2023, antara lain: beras, angkutan udara, daging ayam ras, rokok putih, dan emas perhiasan. Sementara beberapa komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi yoy, antara lain: ikan ekor kuning, ikan cakalang, tomat, ikan tongkol, dan ikan salam.

**Tabel 8. Tingkat Inflasi Month to Month, Year To Date dan Year on Year Tahun 2021-2023**

No	Inflasi	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Month to Month (mtm) November	0,29	-0,29	0,10
2	Year To Date (ytd) November	-0,20	4,82	0,87
3	Year on Year (yoy) November	0,82	6,81	1,82

**Tabel 9. IHK, Andil Inflasi, dan Inflasi Year on Year Kota Jayapura Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)**

No	Kelompok	IHK November 2023	Inflasi November 2023 <sup>1)</sup>	Andil Inflasi	Inflasi Year-on-Year <sup>2)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Umum	112,99	0,10	0,10	1,82
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	112,15	0,37	0,12	1,35
2	Pakaian dan Alas Kaki	105,15	0,00	0,00	0,63
3	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	104,26	-0,25	-0,05	0,05
4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	110,47	-0,09	-0,004	-0,05
5	Kesehatan	116,90	-0,27	-0,005	2,46
6	Transportasi	130,47	-0,65	-0,09	4,23
7	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	100,40	-0,01	-0,001	-0,46
8	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	110,73	0,00	0,00	0,78
9	Pendidikan	128,65	0,00	0,00	5,18
10	Penyediaan Makanan dan Minuman / Restoran	111,05	0,26	0,02	1,13
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	120,17	1,60	0,11	6,40

Keterangan:

1) Persentase perubahan IHK November 2023 terhadap IHK Oktober 2023

2) Persentase perubahan IHK November 2023 terhadap IHK November 2022

## PENJELASAN TEKNIS

- Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen.
- Mulai Februari 2020, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018=100. Ada beberapa perubahan mendasar dalam penghitungan IHK tahun dasar 2018=100 dibandingkan IHK 2012=100, khususnya dari sisi cakupan, klasifikasi pengelompokan komoditas, metodologi penghitungan IHK, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2018 yang dilaksanakan oleh BPS Kota IHK di seluruh Indonesia, sebagai salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK. Hasil SBH 2018 mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat yang terjadi di Indonesia.
- SBH 2018 dilaksanakan di 90 kota, yang terdiri dari 34 ibu kota provinsi dan 56 kabupaten/kota. Dari 90 kota tersebut, 3 diantaranya berada di Provinsi Papua yang meliputi: Merauke, Timika, dan Kota Jayapura. Survei ini dilaksanakan di daerah perkotaan dengan mencatat seluruh pengeluaran rumah tangga setiap bulannya.
- Selain perubahan cakupan, IHK (2018=100) juga mengalami perubahan dari sisi pengelompokan komoditas. Pengelompokan komoditas didasarkan pada Classification of Individual Consumption According to Purpose (COICOP) 2018 dari sebelumnya menggunakan COICOP 1999. Klasifikasi COICOP 2018 yang digunakan dimodifikasi dari 13 divisi COICOP menjadi 11 kelompok IHK. Secara nasional pengelompokan komoditas terdiri dari 11 kelompok dan 43 subkelompok.
- Metode penghitungan IHK gabungan 3 kota di Papua pada 2018=100 menggunakan agregasi nilai konsumsi total seluruh kota. Adapun penghitungan rata-rata pada level komoditas menggunakan metode geometrik.

# 16 Inflasi Kota Merauke

***"November 2023, inflasi mtm sebesar 0,30 persen, inflasi ytd sebesar 3,86 persen dan inflasi yoy sebesar 5,25 persen"***

Pada November 2023, terjadi inflasi yoy sebesar 5,25 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,57 pada November 2022 menjadi 115,32 pada November 2023. Tingkat inflasi mtm sebesar 0,30 persen dan tingkat inflasi ytd sebesar 3,86 persen.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran pada: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 8,98 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,52 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,17 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,45 persen; kelompok kesehatan sebesar 8,50 persen; kelompok transportasi sebesar 1,70 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 7,58 persen; kelompok pendidikan sebesar 3,08 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 6,01 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 9,98 persen.

Beberapa komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy pada November 2023, antara lain: beras, cabai rawit, rokok kretek filter, rokok putih, dan makanan ringan/snack. Sementara beberapa komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi yoy, antara lain: sawi hijau, bawang merah, tomat, minyak goreng, dan telur ayam ras.

**Tabel 10. Tingkat Inflasi Month to Month, Year To Date dan Year on Year Tahun 2021-2023**

No	Inflasi	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Month to Month (mtm) November	-0,17	-0,05	0,30
2	Year To Date (ytd) November	0,15	3,52	3,86
3	Year on Year (yoy) November	0,81	5,10	5,25



**Tabel 11. IHK, Andil Inflasi, dan Inflasi Year on Year Kota Merauke Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)**

No	Kelompok	IHK November 2023	Inflasi November 2023 <sup>1)</sup>	Andil Inflasi	Inflasi Year-on-Year <sup>2)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Umum	115,32	0,30	0,30	5,25
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	121,31	0,04	0,01	8,98
2	Pakaian dan Alas Kaki	104,22	0,00	0,00	2,52
3	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	104,05	0,01	0,002	2,17
4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	113,08	0,06	0,003	1,45
5	Kesehatan	128,03	0,06	0,002	8,50
6	Transportasi	119,18	1,89	0,21	1,70
7	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	101,50	0,00	0,00	-0,68
8	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	119,27	0,00	0,00	7,58
9	Pendidikan	109,44	0,00	0,00	3,08
10	Penyediaan Makanan dan Minuman / Restoran	119,35	0,00	0,00	6,01
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	132,92	0,94	0,06	9,98

Keterangan:

1) Persentase perubahan IHK November 2023 terhadap IHK Oktober 2023

2) Persentase perubahan IHK November 2023 terhadap IHK November 2022

## PENJELASAN TEKNIS

- Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen.
- Mulai Februari 2020, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018=100. Ada beberapa perubahan mendasar dalam penghitungan IHK tahun dasar 2018=100 dibandingkan IHK 2012=100, khususnya dari sisi cakupan, klasifikasi pengelompokan komoditas, metodologi penghitungan IHK, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2018 yang dilaksanakan oleh BPS Kota IHK di seluruh Indonesia, sebagai salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK. Hasil SBH 2018 mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat yang terjadi di Indonesia.
- SBH 2018 dilaksanakan di 90 kota, yang terdiri dari 34 ibu kota provinsi dan 56 kabupaten/kota. Dari 90 kota tersebut, 3 diantaranya berada di Provinsi Papua yang meliputi: Merauke, Timika, dan Kota Jayapura. Survei ini dilaksanakan di daerah perkotaan dengan mencatat seluruh pengeluaran rumah tangga setiap bulannya.
- Selain perubahan cakupan, IHK (2018=100) juga mengalami perubahan dari sisi pengelompokan komoditas. Pengelompokan komoditas didasarkan pada Classification of Individual Consumption According to Purpose (COICOP) 2018 dari sebelumnya menggunakan COICOP 1999. Klasifikasi COICOP 2018 yang digunakan dimodifikasi dari 13 divisi COICOP menjadi 11 kelompok IHK. Secara nasional pengelompokan komoditas terdiri dari 11 kelompok dan 43 subkelompok.
- Metode penghitungan IHK gabungan 3 kota di Papua pada 2018=100 menggunakan agregasi nilai konsumsi total seluruh kota. Adapun penghitungan rata-rata pada level komoditas menggunakan metode geometrik.

# 17 Inflasi Kota Timika

***"November 2023, inflasi mtm sebesar 0,84 persen, inflasi ytd sebesar 3,14 persen dan inflasi yoy sebesar 3,86 persen"***

Pada November 2023, terjadi inflasi yoy sebesar 3,86 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 115,09 pada November 2022 menjadi 119,53 pada November 2023. Tingkat inflasi mtm sebesar 0,84 persen dan tingkat inflasi ytd sebesar 3,14 persen.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran pada: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,70 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,25 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,45 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,74 persen; kelompok transportasi sebesar 3,42 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,64 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,86 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,09 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 9,88 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,02 persen.

Beberapa komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy pada November 2023, antara lain: beras, ikan cakalang/ ikan sisik, rokok kretek filter, bawang putih, dan bahan bakar rumah tangga. Sementara beberapa komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi yoy, antara lain: ikan kembung, bawang merah, air kemasan, tahu mentah, dan cabai merah.

**Tabel 12. Tingkat Inflasi Month to Month, Year To Date dan Year on Year Tahun 2021-2023**

No	Inflasi	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Month to Month (mtm) November	0,35	0,34	0,84
2	Year To Date (ytd) November	0,84	5,20	3,14
3	Year on Year (yoy) November	1,19	6,51	3,86



**Tabel 13. IHK, Andil Inflasi, dan Inflasi Year on Year Kota Timika Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)**

No (1)	Kelompok (2)	IHK November 2023 (3)	Inflasi November 2023 <sup>1)</sup> (4)	Andil Inflasi (5)	Inflasi Year-on-Year <sup>2)</sup> (6)
	Umum	119,53	0,84	0,84	3,86
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	127,25	0,31	0,14	4,70
2	Pakaian dan Alas Kaki	100,75	0,01	0,0004	0,25
3	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	107,27	0,98	0,13	3,45
4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	112,24	-0,11	-0,01	2,74
5	Kesehatan	97,20	0,03	0,001	-1,45
6	Transportasi	148,33	3,81	0,39	3,42
7	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	99,76	0,00	0,00	0,64
8	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	117,18	-0,01	-0,0001	1,86
9	Pendidikan	103,65	0,00	0,00	1,09
10	Penyediaan Makanan dan Minuman / Restoran	118,91	5,03	0,16	9,88
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	119,01	0,56	0,03	7,02

Keterangan:

1) Persentase perubahan IHK November 2023 terhadap IHK Oktober 2023

2) Persentase perubahan IHK November 2023 terhadap IHK November 2022



## PENJELASAN TEKNIS

- Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen.
- Mulai Februari 2020, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018=100. Ada beberapa perubahan mendasar dalam penghitungan IHK tahun dasar 2018=100 dibandingkan IHK 2012=100, khususnya dari sisi cakupan, klasifikasi pengelompokan komoditas, metodologi penghitungan IHK, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2018 yang dilaksanakan oleh BPS Kota IHK di seluruh Indonesia, sebagai salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK. Hasil SBH 2018 mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat yang terjadi di Indonesia.
- SBH 2018 dilaksanakan di 90 kota, yang terdiri dari 34 ibu kota provinsi dan 56 kabupaten/kota. Dari 90 kota tersebut, 3 diantaranya berada di Provinsi Papua yang meliputi: Merauke, Timika, dan Kota Jayapura. Survei ini dilaksanakan di daerah perkotaan dengan mencatat seluruh pengeluaran rumah tangga setiap bulannya.
- Selain perubahan cakupan, IHK (2018=100) juga mengalami perubahan dari sisi pengelompokan komoditas. Pengelompokan komoditas didasarkan pada Classification of Individual Consumption According to Purpose (COICOP) 2018 dari sebelumnya menggunakan COICOP 1999. Klasifikasi COICOP 2018 yang digunakan dimodifikasi dari 13 divisi COICOP menjadi 11 kelompok IHK. Secara nasional pengelompokan komoditas terdiri dari 11 kelompok dan 43 subkelompok.
- Metode penghitungan IHK gabungan 3 kota di Papua pada 2018=100 menggunakan agregasi nilai konsumsi total seluruh kota. Adapun penghitungan rata-rata pada level komoditas menggunakan metode geometrik.

# Produk Domestik Regional Bruto **18**

## **"Ekonomi Papua pada triwulan III-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 8,28 persen (y-o-y)"**

Pada triwulan III-2023, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 73,22 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 46,58 triliun.

### **A. PDRB Menurut Lapangan Usaha**

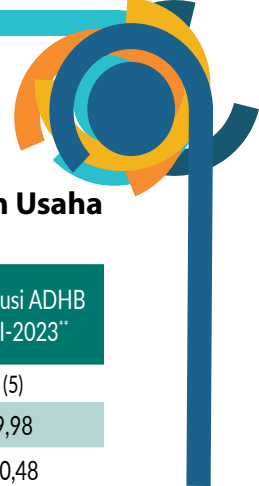
Ekonomi Papua dengan Pertambangan dan Penggalian triwulan III-2023 dibanding triwulan III-2022 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 8,28 persen. Pertumbuhan ini terjadi pada 15 (lima belas) lapangan usaha, sedangkan 2 (dua) lapangan usaha lainnya yaitu Pengadaan Air dan Pengelolaan Limbah dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial mengalami kontraksi. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Pertambangan dan Penggalian yang meningkat sebesar 15,08 persen yang disebabkan karena meningkatnya produksi emas dan tembaga pada tambang PT.Freeport Indonesia.

Secara q to q, ekonomi Papua pada triwulan III-2023 dibandingkan triwulan II-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 3,56 persen. Pertumbuhan ini disebabkan karena peningkatan produksi emas dan tembaga PT. Freeport Indonesia dan oleh Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta Perdagangan Besar dan Eceran. Dari tujuh belas lapangan usaha ada lima lapangan usaha yang mengalami kontraksi.

Ekonomi Papua Tanpa Pertambangan dan Penggalian triwulan III-2023 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 1,01 persen. Pertumbuhan ini melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dengan pertumbuhan sebesar 2,55 persen.

### **B. PDRB Menurut Pengeluaran**

Ekonomi Papua triwulan III-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 8,28 persen (y-on-y). Pertumbuhan terjadi pada semua komponen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-RT) yang tumbuh sebesar 4,96 persen dan pertumbuhan terendah pada komponen pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,40 persen. Selain itu, Komponen Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor



**Tabel 14. Laju Pertumbuhan PDRB dengan Pertambangan dan Penggalian ADHB Menurut Beberapa Kategori Lapangan Usaha (persen)**

No	Kategori	Laju Pertumbuhan Tw III-2023** terhadap Tw II-2023** (q-to-q)	Laju Pertumbuhan Tw III-2023** terhadap Tw III-2022' (y-on-y)	Distribusi ADHB Tw III-2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-0,66	0,08	9,98
2	Pertambangan dan Penggalian	6,89	15,08	40,48
3	Industri Pengolahan	3,06	3,42	1,61
4	Konstruksi	1,05	3,50	12,96
5	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,07	6,59	9,37
6	Transportasi dan Pergudangan	1,47	7,37	4,63
7	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,42	-0,57	7,93
8	Jasa Lainnya	2,99	6,23	0,95
	<b>PDRB</b>	<b>3,56</b>	<b>8,28</b>	<b>-</b>

Catatan: \*Angka Sementara      \*\*Angka Sangat Sementara

pengurang PDRB tumbuh sebesar 35,38 persen.

Ekonomi Papua Triwulan III-2023 mampu tumbuh cukup tinggi yaitu sebesar 3,56 persen (*q-to-q*). Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar komponen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PK-P sebesar 11,03 persen. Sementara itu, Komponen Ekspor Barang dan Jasa serta kompone PK-LNRT mengalami kontraksi sebesar -1,10 persen dan -2,92 persen. Sementara itu, komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang PDRB mengalami pertumbuhan tinggi sebesar 18,07 persen.

**Gambar 12. Pertumbuhan Ekonomi y-on-y Provinsi Papua, Triwulan II-2020 – Triwulan III-2023 (persen)**



**Tabel 15. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (persen)**

No	Kategori	Tw III-2023** terhadap Tw II-2023* (q-to-q)	Tw III-2023** terhadap Tw III-2022* (y-o-y)	Sumber Pertumbuhan Tw III-2023** (y-o-y)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,46	4,96	1,90
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-2,92	5,80	0,10
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,03	8,39	1,43
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,89	2,40	0,68
5	Ekspor Barang dan Jasa	-1,10	5,04	2,06
6	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	18,07	35,38	8,20
	<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>3,56</b>	<b>8,28</b>	<b>8,28</b>

Catatan: \*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

## PENJELASAN TEKNIS

- PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai dan barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha daerah.
- PDRB menggambarkan kondisi ekonomi suatu daerah dalam periode waktu tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun konstan.
- Untuk menghitung PDRB, digunakan 3 pendekatan yaitu Pendekatan Pendapatan, Pendekatan Produksi dan Pendekatan Pengeluaran.
- Data yang digunakan berasal dari survei-survei yang diselenggarakan BPS dan instansi terkait yang mengeluarkan data secara resmi.

# 19 Ekspor

**"November 2023, ekspor Papua mencapai US\$538,07 juta"**

## A. Ekspor Migas dan Non Migas

Ekspor Papua pada November 2023 merupakan gabungan dari data ekspor Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan tercatat senilai US\$538,07 juta atau turun 11,97 persen dibanding bulan sebelumnya senilai US\$611,21 juta. Ekspor Papua pada bulan ini hanya berupa nonmigas senilai US\$538,07 juta dan tidak terdapat ekspor migas. Ekspor terbesar berasal dari Pelabuhan Amamapare senilai US\$538,01 juta atau 99,99 persen dari total ekspor Papua. Total ekspor Papua pada Januari-November 2023 senilai US\$5.631,80 juta, menurun 0,02 persen dibandingkan total ekspor Januari-November 2022 senilai US\$5.633,18 juta.

## B. Ekspor Menurut Golongan Barang HS 2 Dijit

Nilai ekspor golongan Biji logam, terak, dan abu (HS26) pada November 2023 senilai US\$538,01 juta atau turun 11,55 persen dibandingkan bulan sebelumnya senilai US\$608,24 juta. Ekspor golongan Biji Logam, terak dan abu (HS26) berasal dari PT. Freeport Indonesia dan dimuat di pelabuhan Amamapare di Kabupaten Mimika. Pada bulan ini tidak terdapat ekspor Kayu & Barang dari Kayu (HS44). Ekspor golongan Ikan & Hewan Air Lainnya (HS03) senilai US\$0,06 juta. Ekspor Non Migas Lainnya pada bulan ini senilai US\$0,002 juta.

**Tabel 16. Ringkasan Perkembangan Ekspor Provinsi Papua Oktober 2023**

Uraian	Nilai FOB (Juta US\$)			% Perubahan Nov 2023* thd Okt 2023	% Perubahan Jan-Nov 2023* thd Jan-Okt 2022	% Peran thd Total Impor Jan-Nov 2023*
	Okt 2023	Nov 2023*	Jan-Nov 2023*			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Ekspor	611,21	538,07	5.631,80	-11,97	-0,02	100,00
Migas	0,00 <sup>1</sup>	0,00	0,01 <sup>2</sup>	-100,00	713,02	0,00
Non Migas	611,21	538,07	5.631,79	-11,97	-0,02	100,00

Ket: Tanda (\*) menunjukkan Angka Sementara

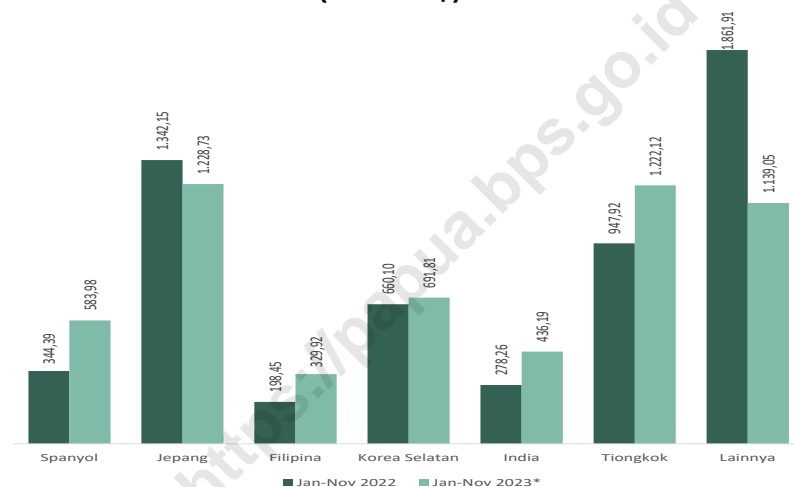
<sup>1</sup> US\$15

<sup>2</sup> US\$10.312

### C. Ekspor Menurut Negara Tujuan

Ekspor ke enam negara utama pada November 2023 tercatat senilai US\$409,08 juta atau turun sebesar 26,54 persen dibanding nilainya pada Oktober 2023 yang sebesar US\$556,89 juta. Ekspor ke negara lainnya pada November 2023 senilai US\$128,99 juta, meningkat 137,50 persen jika dibanding bulan Oktober 2023 senilai US\$54,31 juta. Tiongkok menjadi negara tujuan ekspor terbesar dengan nilai ekspor senilai US\$136,85 juta, dimana komoditi yang diekspor berupa golongan Bijih logam, terak, dan abu (HS26). Tidak terdapat ekspor ke negara tetangga Papua Nugini pada November 2023.

**Gambar 13. Nilai Ekspor Provinsi Papua Menurut Negara Tujuan Januari-November 2023\* (Juta US\$)**



*Ket:Tanda (\*) menunjukkan Angka Sementara*

### D. Ekspor Menurut Pelabuhan Muat

Ekspor Papua terbesar di bulan ini melalui Pelabuhan Amamapare senilai US\$538,01 juta, Bandara Sentani senilai US\$0,001 juta, dan Pelabuhan/Bandara lainnya senilai US\$0,06 juta. Pelabuhan/Bandara lainnya yang dimaksud adalah Bandara Frans Kasiepo dan Pelabuhan Merauke.

### E. Ekspor Melalui Pelabuhan di luar Papua

Selain diekspor melalui pelabuhan ekspor di Papua, barang ekspor Papua di muat di luar Papua. Senilai US\$4,31 juta di muat di Pelabuhan Tanjung Perak yang sebagian besar berasal dari golongan Kayu dan Barang dari Kayu (HS44). Terdapat juga ekspor dari golongan Mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (HS84) dan golongan Perabotan, lampu, dan alat penerangan (HS94). Di Bandara Ngurah Rai Denpasar dimuat barang ekspor senilai US\$0,003 berupa golongan Ikan, krustasea, dan moluska (HS03). Di Bandara Soekarno Hatta dimuat barang ekspor senilai US\$153 dari golongan Kayu dan Barang dari Kayu (HS44).



## PENJELASAN TEKNIS

- Nilai ekspor adalah jumlah nilai Free On Board (FOB) seluruh barang ekspor yang keluar dari daerah pabean Indonesia.
- Free on Board adalah nilai barang sampai pelabuhan muat setelah barang dimuat di kapal.
- Negara tujuan adalah negara tujuan akhir yang diketahui dimana barang tersebut akan dikonsumsi atau diperdagangkan.
- Enam negara tujuan utama ekspor di Papua terdiri atas Spanyol, Jepang, Filipina, Korea Selatan, India, Tiongkok.
- Pelabuhan muat ekspor adalah pelabuhan dimana barang bergerak ke luar negeri. Pelabuhan muat di Papua yaitu Pelabuhan Jayapura, Pelabuhan Serui, Pelabuhan Amamapare, Bandara Sentani dan Pelabuhan Bade.
- Provinsi asal barang adalah provinsi dimana barang tersebut diproduksi atau disimpan/ditimbun untuk diekspor.



## "November 2023, Impor Papua senilai US\$25,06 juta"

### A. Impor Migas dan Non Migas

Impor Papua pada November 2023 yang merupakan gabungan dari data impor Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan senilai US\$25,06 juta berupa impor migas senilai US\$8,97 juta dan impor non migas senilai US\$16,09 juta. Dibandingkan Oktober 2023, nilai impor Papua mengalami penurunan sebesar 32,30 persen yang dipengaruhi oleh impor migas yang mengalami penurunan sebesar 61,27 persen. Komoditi nonmigas yang memiliki nilai impor terbesar berasal dari golongan Barang-barang dari besi dan baja (HS73) yang memiliki nilai US\$5,21 juta atau 42,97 persen dari total nilai impor komoditi non migas utama.

### B. Impor Menurut Golongan Barang HS 2 Dijit

Impor 10 golongan nonmigas utama pada November 2023 senilai US\$12,12 juta atau naik 22,64 persen dibandingkan Oktober 2023 sebesar US\$9,88 juta. Golongan barang nonmigas utama dengan nilai impor terbesar adalah golongan Barang-barang dari besi dan baja (HS73) senilai US\$5,21 juta, Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (HS84) sebesar US\$2,31 juta, dan Mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS85) sebesar US\$2,18 juta. Total nilai impor 10 golongan nonmigas utama pada periode Januari-November 2023 dibandingkan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 72,45 persen, yaitu dari US\$171,55 juta menjadi US\$295,84 juta.

**Tabel 17. Ringkasan Perkembangan Impor Provinsi Papua November 2023\***

Uraian	Nilai CIF (Juta US\$)			% Perubahan Nov 2023* thd Okt 2023	% Perubahan Jan- Nov 2023* thd Jan-Nov 2022	% Peran thd Total Impor Jan-Nov 2023*
	Okt 2023	Nov 2023*	Jan-Nov 2023*			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Impor	37,02	25,06	515,54	-32,30	21,75	100,00
Migas	23,16	8,97	143,09	-61,27	-33,44	27,76
Non Migas	13,86	16,09	372,45	16,10	78,67	72,24

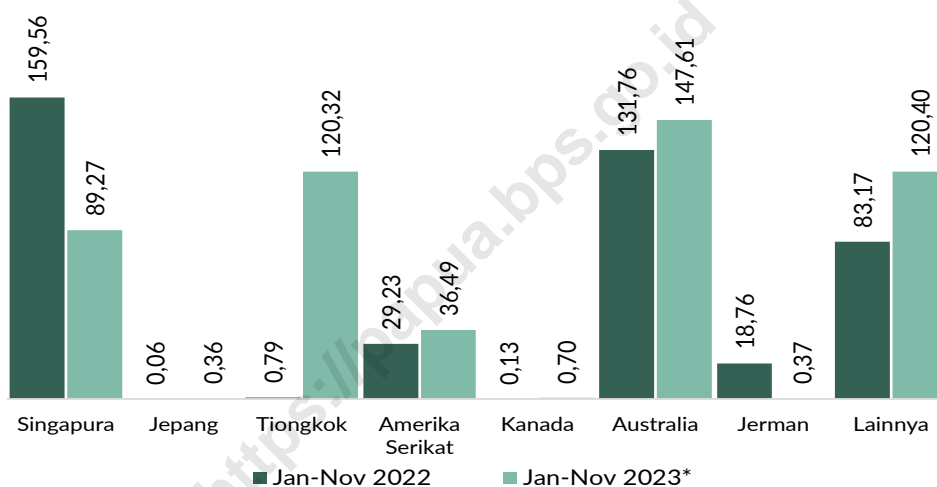
Ket: Tanda (\*) menunjukkan Angka Sementara

### C. Impor Menurut Negara Asal

Nilai impor dari tujuh negara utama pada November 2023 sebesar US\$12,58 juta atau turun 61,89 persen dibandingkan Oktober 2023 sebesar US\$33,02 juta. Sementara Impor dari negara lainnya mengalami peningkatan dari US\$4,00 juta, menjadi US\$12,48 juta.

Total nilai impor dari tujuh negara utama sebesar US\$395,13 juta atau lebih tinggi 16,12 persen dibandingkan Januari-November 2022 sebesar. Total nilai impor dari negara lainnya pada periode Januari-November 2023 meningkat sebesar 44,75 persen dibandingkan periode tahun sebelumnya.

**Gambar 14. Nilai Impor Provinsi Papua Menurut Negara Asal Januari-November 2023\* (Juta US\$)**



Ket:Tanda (\*) menunjukkan Angka Sementara

### D. Neraca Perdagangan

Neraca perdagangan Papua pada November 2023 mengalami surplus sebesar US\$513,01 juta. Surplus terjadi karena nilai ekspor yang lebih besar dari pada impor. Nilai ekspor Papua pada November 2023 tercatat senilai US\$538,07 juta sedangkan nilai impor Papua pada November 2023 sebesar US\$25,06 juta.

**Tabel 18. Neraca Perdagangan Provinsi Papua (Juta US\$)**

Bulan	Ekspor (Juta US\$)	Impor (Juta US\$)	Neraca Perdagangan (Juta US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)
Oktober 2023	611,21	37,02	574,19
November 2023	538,07	25,06	513,01

Ket:Tanda (\*) menunjukkan Angka Sementara

## PENJELASAN TEKNIS

- Total nilai impor adalah jumlah nilai dari Cost, Insurance, and Freight (CIF) seluruh barang impor yang masuk ke wilayah pabean Indonesia.
- $CIF = Fob + Insurance + Freight$
- Nilai impor menggunakan valuta asing Dollar AS dan berat bersih menggunakan kilogram.
- Impor berupa impor migas dan impor nonmigas.
- Enam negara impor utama di Papua adalah Singapura, Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Jerman.

<https://papua.bps.go.id>

# 21 Nilai Tukar Petani

"November 2023, NTP Papua sebesar 100,16"

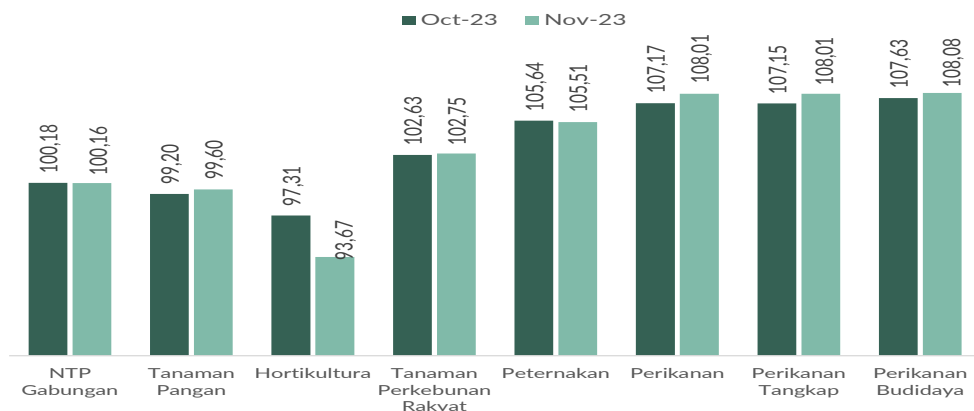
## A. Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP Papua November 2023 tercatat mengalami penurunan sebesar 0,02 persen menjadi 100,16 dibandingkan NTP Oktober 2023. Berdasarkan pemantauan harga perdesaan di Papua, perubahan indeks NTP disebabkan karena indeks harga yang diterima petani (It) naik sebesar 0,13 persen, lebih lambat daripada peningkatan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang sebesar 0,15 persen.

Dilihat menurut subsektornya, tiga dari lima subsektor pertanian mengalami kenaikan, sedangkan dua subsektor lainnya mengalami penurunan, dimana subsektor Perikanan mengalami kenaikan indeks tertinggi sebesar 0,78 persen, sedangkan subsektor Hortikultura mengalami penurunan indeks terdalam sebesar 3,75 persen.

Perubahan harga komoditas yang diproduksi petani ditunjukkan oleh indeks harga yang diterima petani (It). Pada November 2023, It Papua sebesar 111,60 atau naik 0,13 persen dibandingkan It Oktober 2023. Peningkatan It disebabkan oleh peningkatan indeks di beberapa subsektor yaitu subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,61 persen dan subsektor Perikanan sebesar 0,83 persen.

**Gambar 15. Perkembangan NTP Papua Menurut Subsektor September-Oktober 2023 (2018=100)**



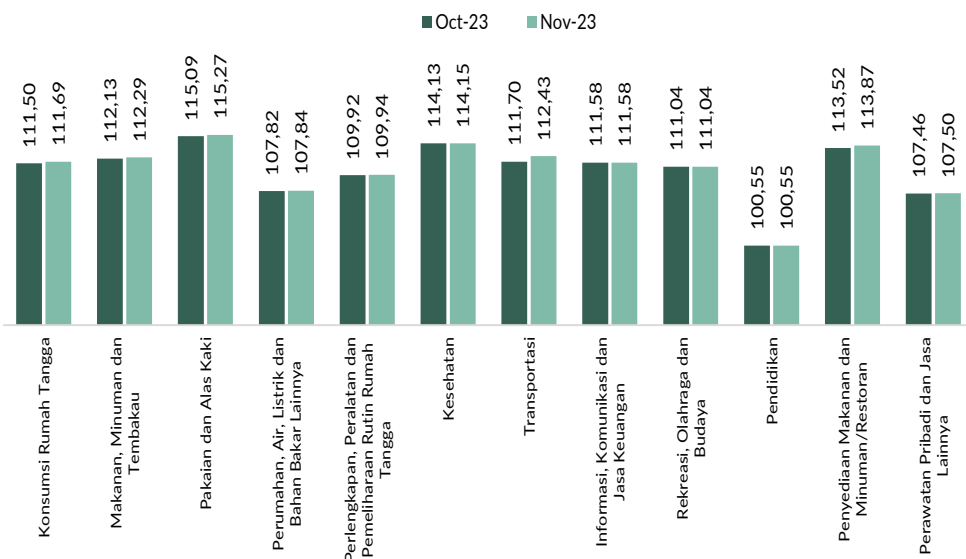
Fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat perdesaan, khususnya petani baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk keperluan produksi hasil pertanian dapat diketahui melalui indeks harga dibayar petani (Ib). Pada November 2023, Ib Papua sebesar 111,42 atau naik 0,15 persen dibandingkan Ib bulan sebelumnya. Peningkatan Ib gabungan tersebut didorong oleh peningkatan Ib pada empat subsektor pertanian yaitu subsektor Tanaman Pangan naik sebesar 0,20 persen, subsektor Hortikultura naik sebesar 0,12 persen, subsektor Peternakan naik sebesar 0,08 persen, dan subsektor Perikanan naik sebesar 0,05 persen.

## B. Perkembangan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT)

Konsumsi Rumah Tangga Petani merupakan salah satu komponen nilai yang dibayar oleh petani. Terjadi kenaikan IKRT bulan November 2023 sebesar 0,17 persen di wilayah perdesaan Papua yang dipicu oleh naiknya indeks harga pada kelompok pengeluaran rumah tangga.

IKRT Nasional November 2023 tercatat mengalami peningkatan, yaitu sebesar 0,80 persen. Dari 34 provinsi di Indonesia diketahui sebanyak 30 provinsi mengalami peningkatan IKRT dan 4 provinsi mengalami penurunan IKRT pada November 2023. Provinsi Yogyakarta tercatat mengalami peningkatan IKRT tertinggi pada November 2023 yaitu sebesar 2,12 persen. Sementara itu, provinsi yang mengalami penurunan IKRT terdalam yaitu Provinsi Sulawesi Barat dengan penurunan sebesar 0,49 persen.

**Gambar 16. Perkembangan Indeks Konsumsi Rumah Tangga Menurut Subkelompok Pengeluaran Provinsi Papua, Oktober-November 2023 (2018=100)**





### C. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Subsektor

NTUP Papua pada November 2023 adalah 101,08 atau naik sebesar 0,05 persen. Jika dirinci menurut subsektor, tercatat NTUP pada subsektor Tanaman Pangan naik sebesar 0,49 persen, pada subsektor Hortikultura turun sebesar 3,63 persen, pada subsektor Peternakan turun sebesar 0,05 persen, dan pada subsektor Perikanan naik sebesar 0,82 persen. Sementara subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat tidak mengalami perubahan NTUP.

**Tabel 19. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian Menurut Subsektor Provinsi Papua dan Persentase Perubahannya, September-Oktober 2023 (2018=100)**

Subsektor (1)	Oktober 2023 (2)	November 2023 (3)	Perubahan (%) (4)
1. Tanaman Pangan	99,14	99,63	0,49
2. Hortikultura	102,06	98,36	-3,63
3. Tanaman Perkebunan Rakyat	104,18	104,19	0,00
4. Peternakan	109,89	109,83	-0,05
5. Perikanan	107,86	108,75	0,82
5.1 Perikanan Tangkap	107,71	108,65	0,87
5.2 Perikanan Budidaya	110,36	110,47	0,10
NTUP Gabungan	101,03	101,08	0,05

## PENJELASAN TEKNIS

- NTP yang diperoleh dari perbandingan indeks harga diterima petani (It) terhadap indeks harga dibayar petani (Ib) (dalam persentase) merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan. NTP menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif, semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.
- Mulai Januari 2020, penghitungan NTP menggunakan indeks harga dengan tahun dasar baru yakni 2018=100 baik untuk It maupun Ib. Ada beberapa perubahan mendasar dalam penghitungan indeks harga 2018=100 dibandingkan dengan indeks harga 2012=100, khususnya mengenai paket komoditas maupun diagram timbang pada masing-masing subsektor yakni Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan dan Perikanan. Pada Subsektor Perikanan, diagram timbang dibangun dari kegiatan Penangkapan Ikan maupun Kegiatan Budidaya Ikan.
- Perubahan paket komoditas dan diagram timbang dalam penghitungan NTP dengan indeks harga 2018=100 didasarkan pada hasil Survei Penyempurnaan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani 2017 (SPDT-NTP 2017) yang dilaksanakan oleh BPS. Hasil SPDT-NTP 2017 ini sekaligus mencerminkan adanya perubahan pola produksi, pola biaya produksi dan pola konsumsi rumah tangga petani dibandingkan dengan hasil SPDT-NTP periode sebelumnya yang dilaksanakan pada tahun 2012. Secara nasional, penghitungan NTP dengan tahun dasar baru mencakup 34 provinsi sedangkan pada tahun dasar sebelumnya mencakup 33 provinsi.
- Perubahan mendasar lainnya terjadi pada pengklasifikasian pengeluaran konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu komponen nilai yang dibayar oleh rumah tangga petani. Perkembangan harga konsumsi rumah tangga yang meliputi berbagai barang dan jasa dari waktu ke waktu tercermin melalui Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT). IKRT yang dihitung dengan tahun dasar baru 2018=100 menggunakan klasifikasi pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan modifikasi *Classification of Individual Consumption According to Purpose 2018* (COICOP 2018. COICOP 2018 merupakan referensi internasional untuk klasifikasi pengeluaran rumah tangga. Pengklasifikasian pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan COICOP 2018 terdiri dari 11 (sebelas) Kelompok Pengeluaran. Sementara itu, pada tahun dasar sebelumnya yakni 2012=100, pengklasifikasian rumah tangga didasarkan pada 7 (tujuh) Kelompok Pengeluaran berdasarkan modifikasi COICOP 1999.

# 22 Angkutan Laut

**"Oktober 2023, penumpang berangkat (angkutan laut dalam negeri) sebanyak 13.388 orang"**

## A. Penumpang Berangkat dan Datang

Ketentuan bepergian bagi pelaku perjalanan mengalami penyesuaian yang dituangkan dalam Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 1 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan pada Masa Transisi Endemi Covid-19, dimana aturan sebelumnya sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Penerapan protokol kesehatan tetap dilakukan, seperti menggunakan masker disaat keadaan tidak sehat, membawa hand sanitizer dan menggunakan aplikasi SATUSEHAT untuk memantau kesehatan pribadi.

Perkembangan penumpang berangkat menggunakan angkutan laut selama Oktober 2023 dirangkum dalam Tabel 16 di bawah ini. Jumlah penumpang yang berangkat menggunakan angkutan laut dalam negeri pada Oktober 2023 tercatat sebanyak 12.170 orang atau turun sebesar 9,10 persen dibanding September 2023 yang sebanyak 13.388 orang. Dilihat menurut pelabuhan, jumlah penumpang yang berangkat melalui Pelabuhan Jayapura tercatat sebanyak 10.172 orang dan penumpang yang berangkat melalui Pelabuhan Merauke sejumlah 1.998 orang.

**Tabel 20. Perkembangan Penumpang Berangkat dan Datang Angkutan Laut Dalam Negeri Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke, Oktober 2023**

Pelabuhan	Jumlah Penumpang Berangkat			Jumlah Penumpang Datang		
	Sep'23 (orang)	Okt'23 (orang)	% Perubahan Okt'23 thd Sep'23	Sep'23 (orang)	Okt'23 (orang)	% Perubahan Okt'23 thd Sep'23
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jayapura	11.412	10.172	-10,87	9.207	9.378	1,86
Merauke	1.976	1.998	1,11	1.911	2.054	7,48
Total	13.388	12.170	-9,10	11.118	11.432	2,82



Secara kumulatif jumlah embarkasi penumpang angkutan laut selama Januari-Oktober 2023 mencapai 140.880 orang atau meningkat sebesar 26,06 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 yang sebanyak 111.758 orang. Dibandingkan periode Januari-Oktober 2022, arus debarkasi penumpang pada periode Januari-Oktober 2023, meningkat sebesar 22,90 persen dari 116.781 orang menjadi 143.525 orang.

## B. Bongkar dan Muat Barang

Volume barang yang dimuat pada Oktober 2023 tercatat sebesar 19.263 ton atau naik sebesar 7,97 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 17.841 ton. Volume barang yang dibongkar pada Oktober 2023 sebesar 111.456 ton atau naik sebesar 21,84 persen dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 91.474 ton.

Secara kumulatif, volume barang yang dimuat pada Januari-Oktober 2023 di kedua pelabuhan sebesar 181.880 ton, mengalami penurunan sebesar 6,10 persen bila dibandingkan dengan Januari-Oktober 2022 yang sebesar 193.691 ton. Volume bongkar barang di Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke selama Januari-Oktober 2023 sebesar 886.211 ton atau mengalami penurunan sebesar 24,00 persen bila dibandingkan Januari-Oktober 2022 yang sebesar 1.166.076 ton.

**Tabel 21. Perkembangan Bongkar dan Muat Barang Angkutan Laut Dalam Negeri Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke, Oktober 2023**

Pelabuhan	Volume Bongkar Barang			Volume Muat Barang		
	Sep'23 (Ton)	Okt'23 (Ton)	% Perubahan Okt'23 thd Sep'23	Sep'23 (Ton)	Okt'23 (Ton)	% Perubahan Okt'23 thd Sep'23
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jayapura	64.465	70.087	8,72	11.731	9.345	-20,34
Merauke	27.009	41.369	53,17	6.110	9.918	62,32
Total	91.474	111.456	21,84	17.841	19.263	7,97

## PENJELASAN TEKNIS

- Angkutan Laut terdiri atas data penumpang yang berangkat/datang dan barang yang dibongkar dan dimuat di pelabuhan pelabuhan Jayapura dan Merauke.
- Periode pengumpulan data dilakukan pada satu bulan sebelum bulan berjalan.
- Data berasal dari data SIMOPEL yang berasal dari pelabuhan.

# 23 *Angkutan Udara*

**"Oktober 2023, penumpang berangkat (angkutan udara dalam negeri) sebanyak 99.108 orang"**

## A. Penumpang Berangkat dan Datang

Jumlah penumpang yang berangkat menggunakan angkutan udara dalam negeri pada Oktober 2023 tercatat sebanyak 99.108 orang atau naik sebesar 12,50 persen dibanding September 2023 yang sebanyak 88.097 orang. Jika dirinci menurut bandara, jumlah penumpang yang berangkat melalui Bandara Sentani di Jayapura tercatat sebanyak 59.019 orang, penumpang yang berangkat melalui Bandara Mopah di Merauke sejumlah 13.037 orang, dan jumlah penumpang yang berangkat melalui Bandara Mozes Kilangin di Mimika sebanyak 27.052 orang.

Jumlah penumpang yang datang dengan menggunakan angkutan udara dalam negeri pada Oktober 2023 tercatat sebanyak 109.262 orang atau naik sebesar 15,07 persen bila dibandingkan September 2023 yang sebanyak 94.952 orang. Jumlah penumpang yang datang pada Oktober 2023 tercatat sebanyak 71.061 orang di Bandara Sentani, 13.298 orang di Bandara Mopah, dan 24.903 orang di Bandara Mozes Kilangin.

**Tabel 22. Perkembangan Penumpang Berangkat dan Datang Angkutan Udara Dalam Negeri Bandara Sentani, Mopah, dan Mozes Kilangin, Oktober 2023**

Bandara	Jumlah Penumpang Berangkat			Jumlah Penumpang Datang		
	Sep'23 (orang)	Okt'23 (orang)	% Perubahan Okt'23 thd Sep'23	Sep'23 (orang)	Okt'23 (orang)	% Perubahan Okt'23 thd Sep'23
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sentani	56.706	59.019	4,08	64.207	71.061	10,67
Mopah	12.351	13.037	5,55	12.076	13.298	10,12
Mozes Kilangin	19.040	27.052	42,08	18.669	24.903	33,39
Total	88.097	99.108	12,50	94.952	109.262	15,07

Secara kumulatif, jumlah embarkasi penumpang angkutan udara selama Januari-Oktober 2023 mencapai 912.585 orang atau turun sebesar 5,41 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 yang sebanyak 964.775 orang. Arus debarkasi penumpang angkutan udara selama Januari-Oktober 2023 mengalami penurunan sebesar 12,05 persen menjadi 1.001.849 orang jika dibandingkan Januari-Oktober 2022 yang sebanyak 1.139.117 orang.

## B. Bongkar dan Muat Barang

Volume barang yang dimuat pada Oktober 2023 tercatat sebesar 15.992 ton atau naik sebesar 29,37 persen dibandingkan bulan September 2023 yang sebesar 12.362 ton. Volume barang yang dibongkar pada Oktober 2023 sebesar 1.349 ton atau naik sebesar 6,05 persen dibanding bulan September 2023 yang sebesar 1.272 ton.

Secara kumulatif, volume muat barang sepanjang Januari-Oktober 2023 sebesar 108.360 ton, turun sebesar 6,80 persen bila dibandingkan dengan Januari-Oktober 2022 yang sebesar 116.264 ton. Di mana di Bandara Sentani turun sebesar 5,74 persen dan Bandara Mozes Kilangin turun sebesar 15,05 persen sedangkan di Bandara Mopah naik sebesar 8,60 persen. Volume bongkar barang selama Januari-Oktober 2023 di ketiga bandara ini sebesar 11.156 ton atau menurun sebesar 24,72 persen bila dibandingkan Januari-Oktober 2022 yang sebesar 14.819 ton, di mana di Bandara Sentani turun sebesar 15,31 persen dan Bandara Mozes Kilangin turun sebesar 44,72 persen sedangkan di Bandara Mopah naik sebesar 0,30 persen, .

**Tabel 23. Perkembangan Bongkar dan Muat Barang Angkutan Udara Dalam Negeri Bandara Sentani, Mopah, dan Mozes Kilangin, September 2023**

Bandara	Volume Bongkar Barang			Volume Muat Barang		
	Sep'23 (Ton)	Okt'23 (Ton)	% Perubahan Okt'23 thd Sep'23	Sep'23 (Ton)	Okt'23 (Ton)	% Perubahan Okt'23 thd Sep'23
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sentani	929	840	-9,59	10.767	13.544	25,80
Mopah	94	115	22,27	156	187	19,72
Mozes Kilangin	250	395	58,13	1.439	2.260	57,11
Total	1.272	1.349	6,05	12.362	15.992	29,37



## PENJELASAN TEKNIS

- Angkutan Udara terdiri atas data penumpang yang berangkat/datang dan barang yang dibongkar dan dimuat di Bandara Sentani, Bandara Mopah di Merauke dan Bandara Mozez Kilangin di Timika.
- Periode pengumpulan data dilakukan pada satu bulan sebelum bulan berjalan.
- Data berasal dari survei yang dilakukan oleh BPS kepada instansi terkait terkait (Bandara).

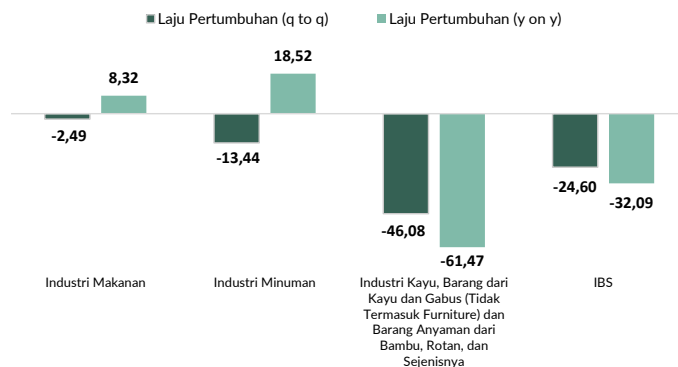
<https://papua.bps.go.id>

## "Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang di triwulan IV-2019 tumbuh negatif 24,60 persen"

### A. Industri Manufaktur Besar Dan Sedang Triwulan IV-Tahun 2019

Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang (q-to-q) pada Triwulan IV-2019 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 24,60 persen dari Triwulan III-2019. Angka pertumbuhan tersebut lebih rendah dari angka pertumbuhan secara nasional yang tumbuh positif sebesar 0,09 persen. Penurunan angka pertumbuhan ini disebabkan karena terjadi penurunan produksi pada Industri Kayu, Barang dari Kayu (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya (KBLI 16). Produksi kayu mengalami penurunan drastis karena vakumnya salah satu perusahaan kayu dengan skala besar di Papua sehingga mempengaruhi jumlah kayu yang dihasilkan. Selain itu, terkait pembatasan izin untuk memperluas lahan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) juga belum menemukan titik terang hingga saat ini. Kondisi yang sama terjadi pada produksi Industri Minuman (KBLI 11). Hal ini merupakan efek lanjutan dari kerusuhan yang terjadi di Papua pada triwulan lalu. Selain itu banyak acara-acara akhir tahun yang tidak dilaksanakan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, mengingat kondisi di beberapa tempat belum kondusif sepenuhnya, yang secara tidak langsung menyebabkan permintaan juga ikut menurun.

**Gambar 17. Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Menurut KBLI Provinsi Papua Triwulan IV-2019 (persen)**



Catatan:

Dari beberapa jenis IBS yang ada di Papua, hanya Industri Makanan (KBLI 10) dan Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya (KBLI 16) saja yang dapat dipublikasikan. Hal ini disebabkan karena tidak semua jenis industri manufaktur besar dan sedang memenuhi syarat penghitungan pertumbuhan produksi industri, karena jumlah perusahaannya yang sangat sedikit.



Jika dibandingkan dengan pertumbuhan produksi Triwulan IV-2018 pertumbuhan Produksi IBS (y-on-y) Provinsi Papua selama Triwulan IV-2019 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 32,09 persen. Hal itu dikarenakan Industri Kayu, Barang dari Kayu (tidak termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya (KBLI 16) mengalami penurunan secara (y-on-y) pada triwulan IV-2019.

## B. Industri Manufaktur Mikro Dan Kecil (IMK) Triwulan IV-2019

Pertumbuhan produksi Industri Mikro dan Kecil di Papua pada Triwulan IV-2019 secara (q-to-q) tumbuh sebesar 1,36 persen dari Triwulan III-2019 dan berada di atas pertumbuhan nasional yang tumbuh negatif sebesar 0,24 persen.

Pertumbuhan positif tersebut dipengaruhi karena adanya perayaan Hari Raya Natal. Produksi barang galian bukan logam (KBLI 23), makanan (KBLI 10) dan minuman (KBLI 11) dengan share yang cukup besar mengalami pertumbuhan positif yaitu 3,68 persen, 0,94 persen dan 5,20 persen dari Triwulan III-2019. Secara y-o-y, produksi Industri Mikro dan Kecil di Papua pada Triwulan IV-2019 ini mengalami pertumbuhan positif 10,53 persen dibandingkan Triwulan IV-2018.

**Tabel 24. Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Menurut KBLI Provinsi Papua Triwulan IV-2019 (persen)**

Kode KBLI	Jenis Industri	Pertumbuhan (%)	
		q to q	y-on-y
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Industri Makanan	0,94	7,28
11	Industri Minuman	5,20	3,88
13	Industri Tekstil	2,06	-7,33
14	Industri Pakaian Jadi	14,42	1,47
15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	22,58	5,63
16	Industri Kayu, Barang dari Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	-6,04	-5,74
18	Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	13,25	-22,19
20	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	-17,13	35,09
21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	-19,26	-32,98
23	Industri Barang Galian Bukan Logam	3,68	5,82
25	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	1,50	4,94
30	Industri Alat Angkutan Lainnya	-55,40	25,98
31	Industri Furnitur	-1,37	-14,34
32	Industri Pengolahan Lainnya	61,21	33,34
33**	Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	-41,42	97,55
Catatan	n** Angka hanya diwakili oleh satu sampel usaha/perusahaan dengan beberapa komoditi		
catatan:	** Angka hanya diwakili oleh satu sampel usaha/perusahaan dengan beberapa komoditi		

# Pola Distribusi Perdagangan **25**

## "Margin Perdagangan dan Pengangkutan Total (MPPT) Provinsi Papua tahun 2022 terdiri atas komoditas Beras, Daging Ayam Ras, Bawang Merah dan Cabai Merah"

Margin Perdagangan dan Pengangkutan Total (MPPT) Provinsi Papua tahun 2021 untuk komoditas beras 21,52 persen; daging ayam ras 36,58 persen; bawang merah 67,18 persen; dan cabai merah 43,28 persen.

Margin Perdagangan dan Pengangkutan Total (MPPT) nasional pada tahun 2021 untuk komoditas beras 11,31 persen; daging ayam ras 25,49 persen; bawang merah 47,39 persen; dan cabai merah 40,41 persen.

**Tabel 25. Pola Utama Distribusi Perdagangan di Papua Tahun 2022**

Komoditas (1)	Pola Distribusi Perdagangan (2)
Beras	Produsen -> Distributor -> Pedagang Eceran -> Konsumen Akhir
Daging Ayam Ras	Luar Provinsi -> Pedagang Grosir -> Pedagang Eceran -> Konsumen Akhir
Bawang Merah	Luar Provinsi -> Pedagang Pengepul -> Pedagang Eceran -> Konsumen Akhir
Cabai Merah	Produsen -> Pedagang Grosir -> Pedagang Eceran -> Konsumen Akhir

## PENJELASAN TEKNIS

- Survei pola distribusi perdagangan beberapa komoditas (Poldis) merupakan survei yang bertujuan untuk mendapatkan pola distribusi perdagangan dan MPPT dari produsen hingga konsumen akhir pada suatu wilayah.
- Data yang dikumpulkan merupakan data tahun 2020, dengan responden produsen dan pedagang yang tersebar di 354 kabupaten/kota potensi komoditas terpilih di 34 provinsi.
- Komoditas strategis dalam survei Poldis dipilih berdasarkan kriteria komoditas yang paling banyak dikonsumsi masyarakat, komoditas yang memiliki peran besar dalam pembentukan inflasi dan komoditas yang mempunyai kontribusi cukup besar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB).
- Pada tahun 2021, komoditas yang terpilih adalah beras, daging ayam ras, bawang merah, dan cabai merah.

## "Tingkat penghunian kamar (TPK) hotel bintang di Papua pada Oktober 2023 mencapai 35,68 persen"

### A. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang

Tingkat Penghunian Kamar Hotel Bintang di Papua selama Oktober 2023 mencapai 35,68 persen atau turun sebesar 4,55 poin dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 40,23 persen. Penurunan terjadi pada kelas bintang tiga dan bintang empat, sebesar 4,35 poin dan 9,39 poin. Sementara pada bintang kelas satu dan bintang kelas dua meningkat sebesar 3,11 poin dan 6,29 poin.

### B. Rata-rata Lama Menginap Tamu (RLMT) Hotel Bintang

Rata-rata Lama Menginap Tamu (RLMT) pada bulan Oktober 2023 sebesar 1,68 poin atau naik sebesar 0,04 poin dibandingkan dengan bulan September 2023. Peningkatan RLMT terjadi pada kelas bintang satu, kelas bintang dua dan kelas bintang empat masing-masing sebesar 0,15 poin, 0,39 poin dan 0,04 poin. Sementara pada bintang tiga mengalami penurunan sebesar 0,03.poin. Jika dibanding bulan yang sama pada tahun sebelumnya, RLMT Oktober 2023 turun 0,22 poin dibanding bulan yang sama pada tahun 2022. Penurunan RLMT terjadi pada setiap kelas bintang, masing-masing sebesar 0,29 poin, 0,81 poin, 0,24 poin dan 0,22 poin.

**Tabel 26. TPK dan RLMT Hotel Bintang di Papua, Oktober 2023**

Uraian	TPK			RLMT		
	Sep 2023	Okt 2023*	Perubahan Okt 2023 thd Sep 2023 (poin)	Sep 2023	Okt 2023*	Perubahan Okt 2023 thd Sep 2023 (poin)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bintang 1	23,00	26,11	3,11	1,35	1,50	0,15
Bintang 2	29,45	35,74	6,29	1,46	1,85	0,39
Bintang 3	49,54	45,19	-4,35	1,59	1,56	-0,03
Bintang 4	41,42	32,03	-9,39	1,78	1,82	0,04
Total Bintang	40,23	35,68	-4,55	1,64	1,68	0,04

Ket:Tanda (\*) menunjukkan Angka Sementara



### C. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Non Bintang

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel klasifikasi Non Bintang di Papua selama Oktober 2023 mencapai 19,57 persen atau turun sebesar 2,36 poin dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 21,93 persen. Penurunan terjadi pada kelas satu, kelas tiga dan kelas empat, masing-masing sebesar 3,42 poin, 5,38 poin, dan 6,23 poin. Sementara kelas dua mengalami peningkatan sebesar 2,77 poin. Jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, TPK Hotel Non Bintang Oktober 2023 turun sebesar 4,78 poin. Penurunan terjadi pada kelas satu, kelas tiga, dan kelas empat masing-masing sebesar 9,20 poin, 10,86 poin, dan 8,39 poin. Sementara pada kelas dua mengalami peningkatan sebesar 3,54 poin.

### D. Rata-rata Lama Menginap Tamu (RLMT) Hotel Non Bintang

Rata-rata Lama Menginap Tamu (RLMT) pada Hotel klasifikasi Non Bintang di Papua pada Oktober 2023 mencapai 1,36 hari atau turun sebesar 0,22 poin dibanding September 2023 yang sebesar 1,58 hari. Penurunan RLMT terjadi pada setiap kelas, masing-masing sebesar 0,19 poin kelas satu, 0,02 poin kelas dua, 0,26 poin kelas tiga, dan 0,42 poin kelas empat. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya RLMT pada Hotel Non Bintang mengalami penurunan sebesar 0,18 poin. Penurunan terjadi pada kelas satu, kelas dua dan kelas empat yaitu sebesar 0,10 poin, 0,10 poin dan 0,71 poin. Sementara pada kelas tiga mengalami peningkatan sebesar 0,05 poin,

**Tabel 27. TPK dan RLMT Hotel Non Bintang di Papua, Oktober 2023**

Uraian	TPK			RLMT		
	Sep 2023	Okt 2023*	Perubahan Okt 2023 thd Sep 2023 (poin)	Sep 2023	Okt 2023*	Perubahan Okt 2023 thd Sep 2023 (poin)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kelas 1	22,23	18,81	-3,42	1,24	1,05	-0,19
Kelas 2	18,17	20,94	2,77	1,49	1,47	-0,02
Kelas 3	26,62	21,24	-5,38	1,69	1,43	-0,26
Kelas 4	22,18	15,95	-6,23	1,62	1,20	-0,42
Total Bintang	22,93	19,57	-2,36	1,58	1,36	-0,22

Ket:Tanda (\*) menunjukkan Angka Sementara



## PENJELASAN TEKNIS

- Tingkat Penghunian Kamar (*Room Occupancy Rate*) adalah perbandingan antara banyaknya malam kamar yang dihuni (*Room Night Occupied*) dengan banyaknya malam kamar yang tersedia (*Room Night Available*). TPK mengindikasikan berapa persentase kamar yang terpakai dibandingkan dengan kamar yang tersedia.
- Rata-rata lamanya tamu menginap adalah banyaknya malam tempat tidur yang dipakai dengan banyaknya tamu yang datang menginap ke akomodasi. Rata-rata lama menginap mengindikasikan berapa lama tamu yang datang dan menginap di suatu hotel/akomodasi, dalam satuan hari.
- Tingkat Penghunian Kamar (TPK) maupun Rata-Rata Lama Menginap Tamu (RLMT) dibedakan atas hotel bintang dan hotel non bintang. Dimana Hotel Bintang terbagi atas 4 kelas Bintang yaitu Bintang Satu, Bintang Dua, Bintang Tiga dan Bintang Empat. Sedangkan hotel non bintang dibedakan menjadi Kelas Satu, Kelas Dua, Kelas Tiga dan Kelas Empat.



# Lampiran







## LAMPIRAN 1

### Indikator Makro Provinsi Papua Tahun 2018 - 2022

Jenis Indikator		2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Indikator Sosial</b>							
Kependudukan dan Kemiskinan	Jumlah penduduk (ribu jiwa)	3.322,52 <sup>1</sup>	3.379,30 <sup>1</sup>	4.290,76 <sup>2</sup>	4.356,80 <sup>2</sup>	4.420,74 <sup>2</sup>	4.482,69 <sup>2</sup>
	IPM			61,22	61,40	62,16	63,01
	1. UHH saat lahir (tahun)			67,59	67,72	67,98	68,17
	2. Harapan lama sekolah (tahun)			11,08	11,11	11,14	11,15
	3. Rata-rata lama sekolah (tahun)			6,69	6,76	7,02	7,15
	4. Pengeluaran perkapita disesuaikan (ribu Rp)			6.954	6.955	7.146	7.562
	Angkatan kerja (jiwa)						
	Februari	1.851.486	1.808.848	1.837.805	1.832.278	2.584.857	2.508,64
	Agustus	1.835.963	1.842.203	1.767.403	1.952.777	1.991.097	2.516,13
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)						
	Februari	79,38	76,04	75,01	73,47 <sup>3</sup>	80,23 <sup>3</sup>	76,79
	Agustus	79,11 <sup>3</sup>	76,92 <sup>3</sup>	72,16 <sup>3</sup>	78,29 <sup>3</sup>	77,75 <sup>3</sup>	77,20
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			-			
	Februari	2,91	3,42	3,42	3,77 <sup>3</sup>	3,60 <sup>3</sup>	3,49
	Agustus	3,20 <sup>3</sup>	3,65 <sup>3</sup>	4,28 <sup>3</sup>	3,33 <sup>3</sup>	2,83 <sup>3</sup>	2,67
	Persentase penduduk miskin (persen)						
	Maret	27,74	27,53	26,64	26,86	26,56	26,03
	September	27,43	26,55	26,80	27,38	26,80	
	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)						
	Maret	499.463	540.099	562.992	591.959	629.175	686.469
	September	518.811	557.236	580.463	600.795	669.408	
	Distribusi pendapatan (persen)						
	Maret						
	40 % berpendapatan rendah	15,55	15,35	15,62	15,74	15,46	16,38
	40 % berpendapatan sedang	41,03	40,10	39,73	38,43	37,86	38,93
	20 % berpendapatan tinggi	43,42	44,55	44,66	45,82	46,68	44,70
	September						
	40 % berpendapatan rendah	14,77	15,74	15,72	15,94	15,78	
	40 % berpendapatan sedang	40,67	39,34	39,48	38,06	39,14	
	20 % berpendapatan tinggi	44,57	44,92	44,80	45,99	45,09	
Gini Ratio							
Maret	0,384	0,394	0,392	0,397	0,406	0,386	
September	0,398	0,391	0,395	0,396	0,393		

Keterangan:

<sup>1</sup>)Angka Hasil Proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2010

<sup>2</sup>)Angka Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020

## Indikator Makro Provinsi Papua Tahun 2018 – 2022 (lanjutan)

Jenis Indikator		2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Indikator Ekonomi							
Perkembangan Ekonomi	Ekspor-Impor						
	Ekspor (Juta US\$)	3.856,46	1.209,75	1.917,37	4.439,75	6.273,43	
	<i>Januari-Desember</i>						
	Impor (Juta US\$)	522,17	355,35	199,46	383,59	479,01	
	<i>Januari-Desember</i>						
	Neraca Perdagangan(Juta US\$)	3.334,29	854,40	1.717,91	4.056,09	5.794,42	
	<i>Januari-Desember</i>						
	Inflasi						
	Inflasi Kota Jayapura	6,70	0,66	1,77	1,38	4,28	
	Inflasi Kabupaten Merauke	5,42	0,86	3,36	0,36	7,32	
	Inflasi Kabupaten Timika	-	-	1,13	1,65	4,63	
	Pertumbuhan Ekonomi (persen)						
	Dengan Tambang (Persen)	7,32	-15,75	2,32	15,11	2,70	
	Tanpa Tambang (Persen)	5,14	4,98	-3,51	2,49	1,37	
	PDRB Berlaku						
	Dengan Tambang (miliar Rp)	210.600,57	189.510,69	199.186,57	235.486,12	262.515,82	
	Tanpa Tambang (miliar Rp)	133.440,14	144.868,49	142.986,74	148.790,06	161.178,03	
PDRB Harga Konstan							
Dengan Tambang (miliar Rp)	159.711,85	134.565,89	137.787,29	158.674,30	172.904,85		
Tanpa Tambang (miliar Rp)	91.100,68	95.640,84	92.392,10	94.758,85	98.679,75		



## LAMPIRAN 2

### Indikator Strategis Provinsi Papua Tahun 2023

Jenis Indikator		Satuan	2023												
			Jan'	Feb'	Mar'	Apr'	Mei	Jun'	Jul'	Agu'	Sep'	Okt'	Nov'	Des'	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
Perkembangan Ekonomi	Ekonomi														
	Ekspor	Juta US\$	297,31	195,81	443,08	773,78	620,42	399,43	257,43	723,86	771,41	611,21	538,07	-	
	Impor	Juta US\$	35,83	42,46	58,16	22,22	29,65	30,07	46,85	31,12	157,02	36,96	25,06	-	
	Neraca	Juta US\$	261,48	153,35	384,92	751,56	590,76	369,36	210,58	692,74	614,39	574,25	513,01	-	
	Perdagangan														
	Inflasi (y-o-y)														
	Inflasi Gabungan	Persen	-0,40	-0,61	0,39	4,05	3,69	4,13	0,10	-	-	-	-	-	
	Inflasi Kota Jayapura	Persen	-0,55	-0,84	0,12	1,44	-0,05	1,36	-0,16	2,30	1,28	0,77	1,82	-	
	Inflasi Kota Merauke	Persen	0,41	0,10	0,90	1,05	1,03	1,09	-0,08	5,91	4,72	4,89	5,25	-	
	Inflasi Kota Timika	Persen	-0,60	-0,59	0,64	1,40	0,75	0,76	0,83	4,92	4,51	3,34	3,86	-	
	Pertumbuhan Ekonomi (y-o-y)			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
	Dengan Tambang	Persen		-2,39			3,81			8,28				-	
	Tanpa Tambang	Persen		4,67			4,44			3,32				-	
	PDRB ADHB			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
	Dengan Tambang	Miliar Rp		65.294,28			71.079,91			73.219,11				-	
	Tanpa Tambang	Miliar Rp		41.422,58			42.949,96			43.580,45				-	
	Industri Manufaktur Besar dan Sedang	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Industri Manufaktur Mikro dan Kecil	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



### LAMPIRAN 3

#### Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota se-Papua Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 1990, 2000, 2010 dan 2020

No	Kabupaten/Kota	1990	2000	2010	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Merauke	243.722	318.350	195.716	230.932
2	Jayawijaya	355.562	417.326	196.085	269.553
3	Jayapura	246.467	167.227	111.943	166.171
4	Nabire	223.337	125.754	129.893	169.136
5	Kepulauan Yapen	70.333	81.593	82.951	112.676
6	Biak Numfor	90.843	111.092	126.798	134.650
7	Paniai	-	97.726	153.432	220.410
8	Puncak Jaya	-	79.356	101.148	224.527
9	Mimika	-	89.861	182.001	311.969
10	Boven Digoel	-	-	55.784	64.285
11	Mappi	-	-	81.658	108.295
12	Asmat	-	-	76.577	110.105
13	Yahukimo	-	-	164.512	350.880
14	Pegunungan Bintang	-	-	65.434	77.872
15	Tolikara	-	-	114.427	236.986
16	Sarmi	-	-	32.971	41.515
17	Keerom	-	-	48.536	61.623
18	Waropen	-	-	24.639	33.943
19	Supiori	-	-	15.874	22.547
20	Mamberamo Raya	-	-	18.365	36.483
21	Nduga	-	-	79.053	106.533
22	Lanny Jaya	-	-	148.522	196.399
23	Mamberamo Tengah	-	-	39.537	50.685
24	Yalimo	-	-	50.763	101.973
25	Puncak	-	-	93.218	114.741
26	Dogiyai	-	-	84.230	116.206
27	Intan Jaya	-	-	40.490	135.043
28	Deiyai	-	-	62.119	99.091
29	Kota Jayapura	-	174.138	256.705	398.478
	Provinsi Papua	1.230.264	1.684.144	2.833.381	4.303.707



## LAMPIRAN 4

### Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota se-Papua Tahun 2018-2022

No.	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Merauke	156,56	153,05	150,93	148,88	143,10
2	Jayawijaya	311,96	304,65	295,03	288,05	252,52
3	Jayapura	125,98	123,98	120,87	121,79	118,75
4	Nabire	150,45	148,12	138,70	131,74	130,61
5	Kepulauan Yapen	142,25	149,24	142,53	136,06	128,94
6	Biak Numfor	134,88	132,35	129,53	125,74	130,13
7	Paniai	250,29	241,21	229,51	235,44	208,96
8	Puncak Jaya	464,12	459,89	449,51	446,40	373,95
9	Mimika	150,54	133,19	125,93	131,79	120,51
10	Boven Digoel	161,96	162,63	159,84	157,75	140,02
11	Mappi	167,70	152,24	152,02	155,91	150,06
12	Asmat	213,94	202,28	179,68	169,93	149,32
13	Yahukimo	220,02	205,60	192,81	181,94	163,30
14	Pegunungan Bintang	368,02	364,25	356,01	360,05	335,81
15	Tolikara	377,27	360,48	336,37	340,56	287,34
16	Sarmi	163,77	145,09	138,83	139,46	142,74
17	Keerom	147,62	141,98	134,14	127,56	138,87
18	Waropen	186,5	171,32	143,14	148,22	137,68
19	Supiori	149,02	138,44	130,43	139,26	140,95
20	Memberamo Raya	208,29	193,19	184,27	171,96	179,63
21	Nduga	325,36	307,41	297,45	294,92	258,56
22	Lanny Jaya	337,65	333,55	317,27	320,10	285,18
23	Mamberamo Tengah	429,33	422,66	391,82	373,08	323,69
24	Yalimo	370,50	362,18	349,27	333,99	278,42
25	Puncak	498,98	493,31	492,62	478,12	418,96
26	Dogiyai	236,53	224,53	213,51	212,94	192,14
27	Intan Jaya	441,38	439,11	438,39	447,97	405,90
28	Deiyai	253,83	238,89	229,01	238,23	211,21
29	Kota Jayapura	132,86	121,49	120,20	120,57	129,17
	Provinsi Papua	227,90	218,59	208,90	207,11	192,57

## LAMPIRAN 5

### Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi se-Indonesia Tahun 2020-2023

No.	Provinsi	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	73,29	73,48	74,11	74,70
2	SUMATERA UTARA	73,62	73,84	74,51	75,13
3	SUMATERA BARAT	74,29	74,56	75,16	75,64
4	RIAU	73,67	73,89	74,45	74,95
5	JAMBI	72,29	72,62	73,11	73,73
6	SUMATERA SELATAN	71,62	71,83	72,48	73,18
7	BENGKULU	72,93	73,16	73,68	74,30
8	LAMPUNG	71,04	71,25	71,79	72,48
9	KEP. BANGKA BELITUNG	72,74	72,96	73,50	74,09
10	KEPULAUAN RIAU	77,69	77,87	78,48	79,08
11	DKI JAKARTA	81,92	82,25	82,77	83,55
12	JAWA BARAT	72,61	72,96	73,63	74,24
13	JAWA TENGAH	71,88	72,17	72,80	73,39
14	D I YOGYAKARTA	79,95	80,22	80,65	81,09
15	JAWA TIMUR	73,04	73,48	74,05	74,65
16	BANTEN	74,41	74,68	75,25	75,77
17	BALI	76,52	76,69	77,40	78,01
18	NUSA TENGGARA BARAT	70,46	70,86	71,65	72,37
19	NUSA TENGGARA TIMUR	66,93	67,02	67,63	68,40
20	KALIMANTAN BARAT	68,76	68,99	69,71	70,47
21	KALIMANTAN TENGAH	72,62	72,81	73,17	73,73
22	KALIMANTAN SELATAN	73,09	73,45	74,00	74,66
23	KALIMANTAN TIMUR	75,94	76,60	77,36	78,20
24	KALIMANTAN UTARA	71,00	71,57	72,21	72,88
25	SULAWESI UTARA	73,67	74,03	74,52	75,04
26	SULAWESI TENGAH	70,31	70,54	71,01	71,66
27	SULAWESI SELATAN	73,08	73,38	73,96	74,60
28	SULAWESI TENGGARA	71,61	71,82	72,38	72,94
29	GORONTALO	69,51	69,82	70,62	71,25



## LAMPIRAN 6

### PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Dengan Pertambahan dan Penggalian) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022 (Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Merauke	64.403.705,24	69.837.667,20	69.389.107,11	70.560.052,00	74.566.865,61
2	Jayawijaya	35.415.271,07	39.700.463,44	30.734.383,54	30.878.150,56	32.981.712,05
3	Jayapura	113.007.934,27	129.642.018,09	96.474.479,70	101.050.658,79	106.313.271,04
4	Nabire	69.908.072,16	76.260.397,88	66.246.968,06	70.299.467,72	73.350.909,83
5	Kepulauan Yapen	40.114.737,62	44.082.023,31	36.960.294,10	39.162.856,92	40.116.433,93
6	Biak Numfor	34.930.879,39	37.553.701,11	38.802.783,39	40.671.417,61	43.342.696,78
7	Paniai	22.462.852,42	24.702.408,02	19.502.416,66	19.897.948,14	20.704.712,36
8	Puncak Jaya	10.316.102,78	11.249.978,21	6.200.316,99	6.181.100,82	6.264.428,00
9	Mimika	395.993.721,40	256.580.274,85	204.960.691,37	301.036.539,30	343.247.031,56
10	Boven Digoel	67.435.795,70	71.091.624,73	75.065.315,00	76.520.614,71	77.820.198,80
11	Mappi	26.852.997,93	30.027.848,06	27.703.809,28	28.536.369,39	30.147.611,71
12	Asmat	23.626.517,20	25.428.215,11	23.414.875,20	24.139.980,57	25.420.847,68
13	Yahukimo	11.803.069,86	12.642.053,26	7.162.301,03	7.381.777,81	7.475.803,90
14	Pegunungan Bintang	23.700.771,49	25.392.900,76	25.284.199,00	26.600.407,13	28.074.353,10
15	Tolikara	10.627.506,78	11.155.789,30	7.081.554,59	7.139.924,12	7.506.789,03
16	Sarmi	64.315.850,93	71.940.091,41	70.862.080,01	74.486.213,89	78.241.330,17
17	Keerom	48.422.111,60	50.228.997,38	47.547.769,86	49.237.050,54	51.072.907,23
18	Waropen	62.601.875,94	65.619.884,44	60.452.726,53	61.436.297,86	66.108.619,73
19	Supiori	47.294.857,83	50.590.648,15	46.379.140,67	47.565.472,69	49.004.238,36
20	Memberamo Raya	63.708.877,65	70.012.180,75	47.377.017,46	49.624.541,45	52.541.672,67
21	Nduga	11.469.337,55	11.514.547,95	11.959.263,84	12.469.533,00	12.893.954,96
22	Lanny Jaya	9.435.175,66	9.597.930,98	9.854.242,86	10.167.057,24	10.652.106,52
23	Mamberamo Tengah	22.468.981,84	22.674.400,92	23.989.826,36	24.662.389,60	24.886.268,99
24	Yalimo	18.254.273,14	18.893.314,53	12.632.867,57	13.100.379,38	13.698.878,93
25	Puncak	11.569.147,43	12.743.460,64	12.544.717,96	13.104.809,85	13.870.173,64
26	Dogiyai	12.503.498,16	13.572.193,50	11.706.990,65	11.982.543,33	12.063.093,84
27	Intan Jaya	24.251.939,80	25.162.395,87	9.460.171,19	9.520.169,11	9.782.439,35
28	Deiyai	17.484.748,86	18.752.354,62	14.539.553,12	14.838.862,79	15.408.382,61
29	Kota Jayapura	102.166.321,11	108.043.849,90	80.637.679,49	82.026.393,17	86.232.327,04

\* angka sementara

\*\* angka sangat sementara



# DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://papua.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI PAPUA**

Jl. Dr. Sam Ratulangi, Dok II, Jayapura 99112

Telp. (0967) 5165 999, 5165 107

Email: bps9400@bps.go.id